



SINERGI



**Tingkatkan Kualitas
Perencanaan Infrastruktur
Bidang PUPR Melalui
Koordinasi yang Intensif
Antar Kementerian/Lembaga**





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)
KEMENTERIAN PUPR**

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpw@pu.go.id Telp. +6221-2751-5802

SALAM SINERGI

Tim Penyusun

Pengarah:
Hadi Suahyono

Penanggung Jawab:
Iwan Nurwanto

Penasihat
Benny Hermawan
Tris Raditian
Kuswardono
Manggas Rudy Siahaan

Pemimpin Redaksi:
Hari Suharto Diyaksa

Redaktur Pelaksana
Tiara Titi Kartika

Staf Editor :
Indra Maulana
Azim Al Haqy Hakim
Hendra Djamal
Mutri Batul Aini

Tim Pembuat Artikel:
Daris Anugrah
Indira Dwi Kusumatuti
Tim Kontributor Pemberitaan

Sekretariat:
Untung Priyono
Nur Wahyu

Diterbitkan oleh:
Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah (BPIW)
Kementerian PUPR

Design Grafis:
Heri Hito
Infografis, layout :
Ajeng Ayuning Pertiwi

Alamat Redaksi:
Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Email: humasbpw@gmail.com,
humasbpw@pu.go.id
Website: bpw.pu.go.id
No. Telp. +6221-2751-5802

Pembaca yang terhormat

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi BPIW kembali hadir di 2021 ini. Pada edisi 50 Januari – Februari 2021 ini, Buletin Sinergi tampil dengan “wajah” baru, yang mana ukuran buletin lebih minimalis dari sebelumnya. Perubahan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan buletin ke depan.

Beberapa rubrik juga mengalami perubahan, yang mana rubrik-rubrik yang sebelumnya dihilangkan dimunculkan kembali seperti rubrik Tips dan Kuis. Rubrik baru juga dihadirkan seperti BPIW Muda. Rubrik ini memberikan kesempatan bagi generasi muda BPIW untuk menulis berbagai macam hal seperti terkait pengembangan wilayah maupun isu lainnya.

Edisi kali ini, Topik Utama yang dibahas yakni Tingkatkan Kualitas Perencanaan Infrastruktur Bidang PUPR Melalui Koordinasi yang Intensif Antar Kementerian/ Lembaga. Pada rubrik Wawancara menghadirkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. Ditjen Cipta Karya merupakan salah satu user di Kementerian PUPR yang memanfaatkan produk perencanaan dan pemrograman dari BPIW.

Beberapa hal yang dibahas pada rubrik wawancara ini, seperti pandangan Direktur Jenderal Cipta Karya terhadap produk dan harapannya kedepan terhadap BPIW. Sedangkan rubrik Warta BPIW membahas mengenai Sinkronisasi Program BPIW dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi seperti Kilas Peristiwa, Plesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan wilayah, Review, dan Sorot.

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Salam hormat,

Pemimpin Redaksi

daftar isi

Edisi 50 Januari - Februari 2020

13

Wawancara:
Ir. Diana Kusumastuti .M.T.
Perlu Dilakukan Keterpaduan Dokumen
Perencanaan dan Pemrograman dengan
Kementerian/Lembaga Lain



4

Topik Utama:
**Tingkatkan Kualitas
Perencanaan
Infrastruktur Bidang
PUPR Melalui
Koordinasi yang
Intensif Antar
Kementerian/
Lembaga**



28

Serba – Serbi:
Mengenal Jabatan
Fungsional Perencana
Di Kementerian PUPR



18

**Info Pengembangan
Wilayah:**
Pengembangan Metropolitan
Banjarbakula: Tantangan
dan Momentum Mewujudkan
Kawasan Perkotaan yang
Adaptif Terhadap Resiko
Bencana



46

Sosok:
Benny Hermawan S.T, M.Sc
Keseimbangan Antara Pekerjaan
Dan Keluarga



Tingkatkan Kualitas Perencanaan Infrastruktur Bidang PUPR Melalui Koordinasi yang Intensif Antar Kementerian/ Lembaga

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan output yang optimal tahun lalu. Pada tahun ini, sejumlah program telah siap untuk dilaksanakan hingga akhir tahun nanti. Salah satu kegiatan yang sudah berjalan adalah Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil). Koordinasi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan infrastruktur bidang PUPR.

Bendungan Tapin, Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan

Sumber: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

Di 2021 ini, BPIW memulai resolusinya dari sejak awal tahun dengan menggelar Rakorbangwil, mewakili Kementerian PUPR. Rakorbangwil Bidang PUPR ini digelar 17-23 Februari 2021. Saat membuka kegiatan tersebut 17 Februari lalu, Sekjen Kementerian PUPR, M. Zainal Fatah saat saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, kegiatan Rakorbangwil momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR 2022.

"Melalui forum ini, Kementerian PUPR juga ingin memastikan investasi infrastruktur berperan menjadi pendorong tercapainya target-target Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan kawasan-kawasan prioritas," jelasnya pada acara pembukaan tersebut, 17 Februari 2021.

BPIW Kementerian PUPR Hadi Suchayono menambahkan fokus pelaksanaan Rakorbangwil untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis Prioritas dan Usulan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.

"Kegiatan ini memiliki urgensi dalam hal Prioritas Kawasan, Sinkronisasi Program, dan Komitmen bersama antar Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Hasil Rakorbangwil ini sebagai bahan untuk pembahasan Konsultasi Regional nanti," tutur Hadi.



M. Zainal Fatah

Sumber: Kompu BPIW

Rakorbangwil dilaksanakan dengan metode *hybrid* dan *online* yang melibatkan 15 (K/L) antara lain Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kemenko Perekonomian.

Pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.

Sebanyak 39 peserta mengikuti secara *offline* dan 129 peserta mengikuti *video conference* pada hari pertama Rakorbangwil. Usai acara pembukaan digelar sesi diskusi untuk memberikan pencerahan dan panduan kepada

peserta. Adapun narasumbernya antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/ Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono.

Selain Rakorbangwil, maka tahun ini, BPIW melalui empat pusat dan sekretariat telah memiliki berbagai rencana kegiatan. Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional dan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Menengah pada Wilayah Nasional. Pusat ini juga telah melaksanakan Rakorbangwil, yang menjadi bagian tugasnya.

Sedangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I melakukan



Pejabat BPIW dalam pelaksanaan Rakorbangwil

Sumber: Kompu BPIW

pengembangan infrastruktur Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan beberapa kegiatan antara lain menyusun Rencana Induk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian, Sinkronisasi Program, Pemantauan dan Evaluasi, serta Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Kawasan di dua pulau tersebut.

Tidak hanya kegiatan-kegiatan itu, di pusat wilayah I ini, BPIW fokus pada beberapa KI seperti Tanjung Enim dan Tanggamus. Selain itu BPIW fokus pada daerah tertinggal termasuk di kawasan pesisir barat Sumatera, pulau-pulau kecil terluar yang ada di Sumatera dan Kalimantan.

Kegiatan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II terkait pengembangan

wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Beberapa kegiatannya antara lain Rencana Induk, Sinkronisasi Program, Pemantauan, Evaluasi, dan PJM Kawasan di tiga pulau itu. Selain kegiatan-kegiatan itu, BPIW memfokuskan pada kelanjutan dari penyiapan rencana program untuk destinasi pariwisata yakni Bromo-Semeru-Tengger, Labuan Bajo, dan Wakatobi.

Sedangkan Pengembangan Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua ditangani Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Kegiatan yang dilakukan pada tahun ini antara lain penyusunan Rencana Induk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Kemudian ada program Sinkronisasi Program, Pemantauan dan



sumber: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW. Foto Pak Kaba sumber: Kompu BPIW

Evaluasi dan Rencana Induk Pengembangan PJM Kawasan di pulau dan kepulauan tersebut. Fokus dari kegiatan yang dilakukan pusat Wilayah III ini antara lain kawasan-kawasan khusus yang ada di sana, KSPN Morotai, PKN Ambon, & tambah KI Teluk Weda, Ambon, Maminasata sebagai metropolitan. Di Pulau Papua BPIW fokus pada perbatasan Jayapura, pangan sugu di Mappi, Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat.

Kegiatan Sekretariat BPIW difokuskan pada dukungan manajemen antara lain Layanan Perkantoran (Gaji, Tunjangan Kinerja, Pengadaan peralatan, dan Operasional Kantor), administrasi Perencanaan, Pemrograman, Monev Pemrograman, dan Pengelolaan Keuangan. Kegiatan lainnya adalah Layanan Umum dan BMN, Administrasi Kepegawaian dan Ortala, Administrasi Hukum, Kerjasama, Komunikasi Publik, dan Pengelolaan database.

BPIW Lakukan Kegiatan Dengan Output yang Maksimal pada 2020

Pada 2020, BPIW berhasil melaksanakan realisasi keuangan sebesar 89,10 persen dan realisasi fisik mencapai 99,53 persen. Dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut, output yang dilakukan BPIW tahun lalu, sudah

optimal. Hal itu disampaikan Hadi pada rapat dengan Komisi V DPR RI, Januari lalu.

Salah satu kegiatan yang berhasil dilakukan adalah Konsultasi Regional (Konreg). Kegiatan pembahasan program jangka pendek ini menghimpun aspirasi dari daerah terkait program yang akan dilaksanakan tahun 2021. Pemerintah Daerah diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi. Selain itu juga diikuti instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, dan perwakilan Kementerian PUPR di daerah yakni balai-balai.

BPIW juga bertugas menyusun perencanaan dan program, seperti menyusun Masterplan / Development Plan (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur PUPR yang



TUGAS DAN FUNGSI BPIW 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M/2020

TUGAS BPIW

"Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan pengembangan wilayah"

FUNGSI BPIW

- penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
- penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
- pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah
- pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sumber: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW.



Sumber: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW

terpadu. Teknis detail dan pembangunan fisik infrastruktur dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait di Kementerian PUPR, yakni Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Sumber Daya Air atau biasa disebut ABCP. BPIW juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 terkait semua unit organisasi di Kementerian PUPR.

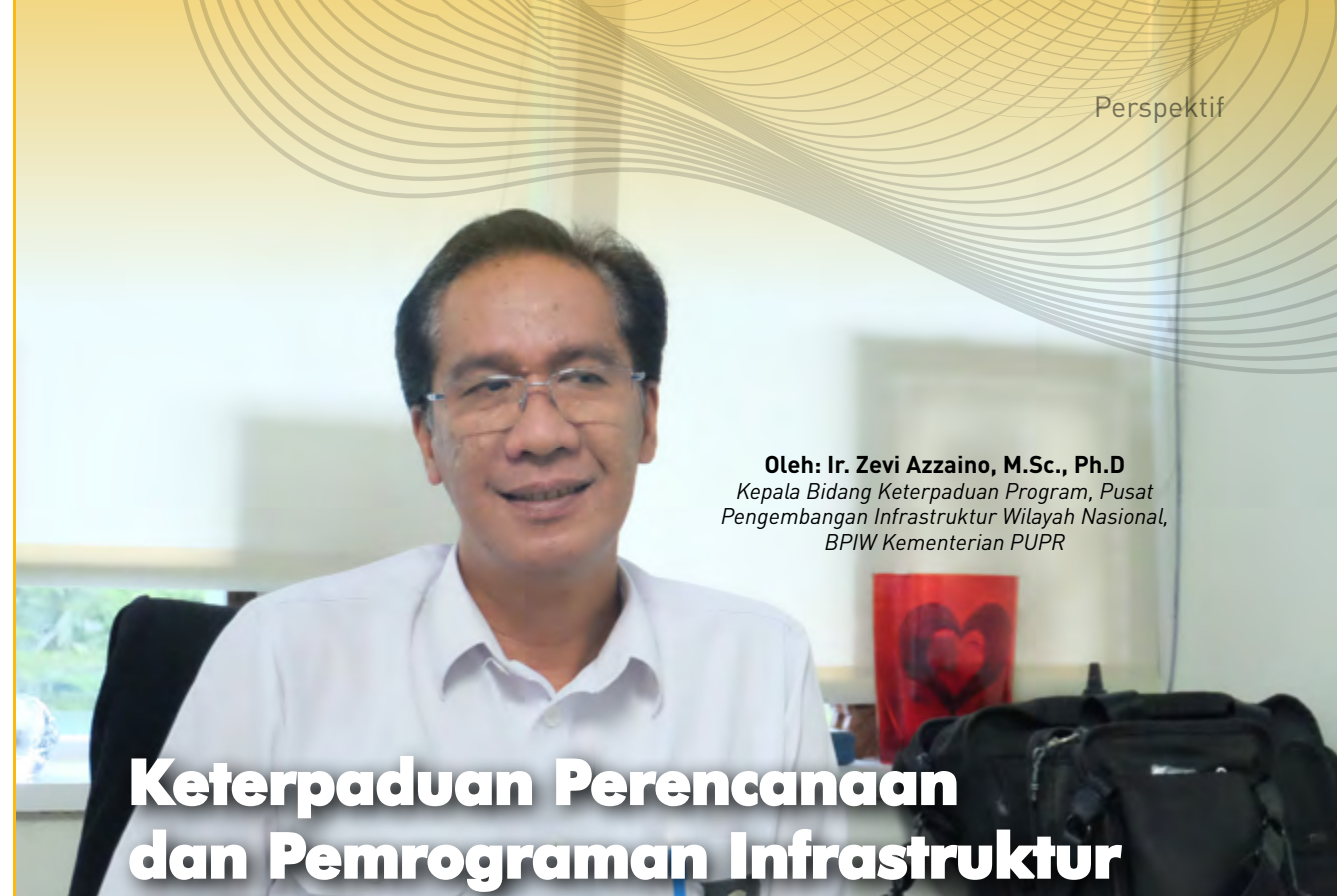
Kawasan Industri (KI) tak luput dari dukungan perencanaan dan program BPIW seperti sembilan KI Prioritas Nasional yakni KI/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, KI Bintang *Aerospace*, KI/KEK Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI/KEK Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni. Selain itu BPIW juga menyusun perencanaan dan program pada KEK yang sudah beroperasi seperti KEK Arun Lhokseumawe, Sei Mangke, dan Tanjung Api-api.

Dukungan perencanaan juga terkait Destinasi Pariwisata Prioritas seperti Danau Toba dan kawasan sekitarnya, Bangka Belitung, Borobudur dan kawasan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Manado-Likupang, Morotai, dan Raja Ampat.

Perencanaan infrastruktur berbasis mitigasi dan adaptasi bencana yang dilakukan BPIW diantaranya Rencana Penanganan dan

Rekonstruksi Kota Berketahanan di Palu dan Identifikasi kebutuhan Infrastruktur PUPR Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kepulauan Nusa Tenggara.

Sosialisasi terhadap hasil produk-produk BPIW dilakukan melalui BPIW *Virtual Expo*. Kegiatan ini mendapat sambutan positif masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung pameran secara *online* itu yang mencapai 159 ribu orang. Kebanyakan pengunjung menanyakan produk-produk serta perencanaan-perencanaan dilakukan BPIW pada 2020. **(Redaksi)**



Oleh: Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D
Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR

Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR Berbasis pada Pengembangan Wilayah

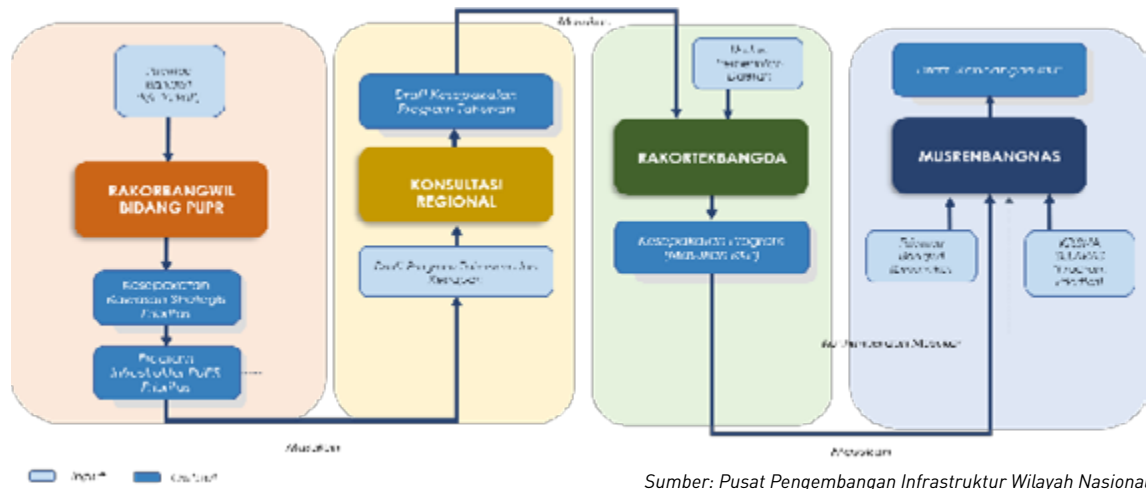
Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis pada pengembangan wilayah, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melakukan koordinasi dan sinergi lintas K/L dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur (Rakorbangwil) Bidang PUPR, dengan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan yang berlaku.

Basis pengembangan wilayah dalam hal ini adalah secara komprehensif mengacu pada arah pengembangan wilayah yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan nasional diantaranya adalah Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebijakan pembangunan sektor-sektor strategis nasional, hingga kebijakan strategis daerah. Selain mengacu pada regulasi formal, penyusunan RPIJP dan RPIJM juga mempertimbangkan kajian-kajian yang telah disusun baik kajian yang

bersifat tematik seperti pariwisata, industri, perkotaan, dan tematik lainnya atau yang bersifat sektoral infrastruktur PUPR seperti sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Berdasarkan telaah kebijakan dan kajian tersebut, BPIW selanjutnya mengkoordinasikan target pembangunan infrastruktur PUPR ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Kementerian PUPR, yang disepakati oleh seluruh Unit Organisasi di Kementerian PUPR. Program dan target 5 (lima) tahunan

ALUR RAKORBANGWIL BIDANG PUPR 2021



Sumber: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

yang tertuang dalam Renstra, kemudian ditajamkan kembali dalam pembahasan program tahunan.

Dalam proses menghasilkan program tahunan yang siap untuk diimplementasikan, indikasi program yang telah muncul dalam RPIJP, RPIJM, dan Renstra perlu melewati proses penapisan, yakni proses Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) yang diselenggarakan oleh BPIW dan Konsultasi Regional (Konreg) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal. Indikasi program yang melalui pembahasan dalam dua proses tahunan ini diharapkan dapat menjadi program yang selaras dengan agenda tahunan pembangunan nasional dan menjadi program yang telah memenuhi indikator kesiapan (*readiness criteria*). Adapun proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR jangka panjang, menengah, dan tahunan dapat dilihat dalam diagram alir berikut ini.

Tantangan pembangunan infrastruktur hingga saat ini adalah memastikan keterpaduan perencanaan, yakni keterpaduan antar dokumen perencanaan dan keterpaduan dalam implementasi program dari hasil suatu perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai elemen pendukung pembangunan nasional, Pembangunan

infrastruktur yang terpadu idealnya memiliki mekanisme koordinasi yang dapat mawadahi sinerginya proses *bottom up* dan *top down planning* sehingga menghasilkan *implementable planning*.

Dalam konteks *Bottom Up Planning*, proses perencanaan perlu memastikan bahwa infrastruktur PUPR yang akan dibangun merupakan infrastruktur yang memang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi ini dituangkan dalam bentuk Forum Konsultasi Regional, yang telah secara rutin dilakukan setiap tahunnya. Dengan adanya forum ini, dimana Pemerintah Daerah dapat menyampaikan aspirasinya terkait program pembangunan infrastruktur PUPR, diharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat lebih tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil penajaman dari pelaksanaan Rakorbangwil Bidang PUPR.

Dalam konteks *Top Down Planning*, koordinasi dan sinergi antar K/L dalam mendukung pengembangan wilayah diwujudkan dalam Forum Rakorbangwil Bidang PUPR. Rakorbangwil Bidang PUPR merupakan tahap awal dari rangkaian proses perencanaan dan



Pembangunan Infrastruktur untuk KSPN Labuan Bajo

Sumber: PUPR

pemrograman infrastruktur PUPR, dimana hasil dari Rakorbangwil Bidang PUPR ini menjadi penajaman untuk dibahas di dalam Forum Konsultasi Regional.

Rakorbangwil Bidang PUPR Tahun 2021 telah dilaksanakan pada 17-23 Februari dengan mengundang 13 Kementerian dan Lembaga, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Sosial. Pembahasan lintas K/L dan sektor dalam rangka penajaman kawasan dan program dilaksanakan dengan tujuan adanya keterpaduan pengembangan wilayah, sehingga manfaat pembangunan tersebut dapat lebih dirasakan oleh masyarakat

Produk ITMP dalam proses penyusunannya pada dasarnya merupakan produk rencana terpadu yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Unit Organisasi Teknis di Kementerian PUPR. Dengan demikian, secara tidak langsung seluruh hasil perencanaan dan

program yang tertuang dalam Dokumen ITMP merupakan kesepakatan tidak tertulis yang perlu dengan komitmen dan konsisten tinggi dapat direalisasikan oleh seluruh pemangku kepentingan karena dapat berpengaruh terhadap tujuan pembangunan 4 (empat) KSPN tersebut.

Meskipun demikian, kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang menjadi keluaran ITMP juga perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Dengan berjalannya mekanisme ideal ini maka diharapkan pelaksanaan ITMP dapat dikendalikan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan kemanfaatan bagi pembangunan KSPN Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar perencanaan dan program yang dilakukan BPIW dapat dimanfaatkan oleh unor-unor. Pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perumusan rencana dan program. Koordinasi dan sinkronisasi ini dimulai dari sejak proses perencanaan melalui integrasi data, interoperabilitas antar aplikasi perencanaan dan pemrograman yang telah ada, sinergitas antara BPIW dan unor-unor dalam berbagai mekanisme forum koordinasi

PENDEKATAN KEWILAYAHAN



Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada **35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)** untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah

Esensi Pengembangan:

1. pengembangan wilayah terpadu dengan "market driven"
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Fokus pada pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS
5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Sumber: Perencanaan BPIW 2019

dan sinkronisasi. Kedua adalah pemantauan dan evaluasi terhadap produk perencanaan dan pemrograman yang telah dihasilkan oleh BPIW. Hal ini penting dilakukan agar dapat memastikan kemanfaatan dari produk perencanaan dan pemrograman yang menjadi output BPIW. Selain itu proses pemantauan dan evaluasi produk perencanaan-pemrograman BPIW juga merupakan upaya untuk menjaga relevansi dokumen perencanaan dengan dinamika pembangunan yang ada, sehingga menjadi *living document* yang *up to date* dan tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR.

BPIW menghadapi banyak tantangan dalam menghasilkan perencanaan Infrastruktur PUPR yang terpadu serta dalam menjawab dinamika pembangunan nasional dan pengembangan wilayah. Harapan saya ke depannya BPIW dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya utamanya dalam menjawab tantangan ini. Koordinasi dan Sinkronisasi menjadi elemen yang esensial dalam mendukung keterpaduan pengembangan Infrastruktur PUPR. Oleh karena itu, berbagai mekanisme dan wadah koordinasi yang telah berjalan baik (baik lintas K/L, lintas Daerah, lintas sektor PUPR, dll) diharapkan terus dilakukan evaluasi, sehingga akan semakin baik di masa yang akan datang.

Peran menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR juga harus dimulai dari kesiapan berbagai sumber daya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran yang sangat strategis dalam hal ini. Pengorganisasian SDM harus dapat memastikan penempatan SDM sesuai kapasitas, adanya peningkatan kapasitas SDM secara terus menerus, serta pembagian peran yang baik antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Organisasi BPIW yang solid selain didukung oleh SDM yang handal, kompeten, dan berintegritas juga perlu didukung oleh struktur organisasi yang baik. Proses bisnis yang dilakukan oleh BPIW seyogyanya mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur lain di internal Kementerian PUPR maupun dengan K/L terkait lainnya.



Ir. Diana Kusumastuti .M.T.

*Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya
Kementerian PUPR*

Perlu Dilakukan Keterpaduan Dokumen Perencanaan dan Pemrograman dengan Kementerian/Lembaga Lain.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan keterpaduan perencanaan dan pemrograman yang “dirancang” BPIW. Ditjen Cipta Karya merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR yang mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Ir. Diana Kusumastuti .M.T. menyatakan perlu dilakukan keterpaduan dengan dokumen perencanaan dan pemrograman sektoral lain di luar Kementerian PUPR atau dengan Kementerian/Lembaga lain agar perencanaan dan pemrograman yang telah dibuat lebih optimal. Simak perbincangan “Buletin Sinergi” dengan orang nomor satu di Ditjen itu berikut ini.

Seperti apa Ditjen Cipta Karya menyusun perencanaan dan pemrograman dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR?

Pembangunan infrastruktur PUPR telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yang dituangkan ke dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2020-2024 sebagai acuan perencanaan dan pemrograman tahunan. Dalam pemenuhan amanat RPJMN dan target Renstra Ditjen Cipta Karya tersebut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan program pembangunan infrastruktur permukiman melalui skema pemrograman secara *top down* dan *bottom up*.

Program pembangunan infrastruktur permukiman disusun berdasarkan arahan pemenuhan prioritas nasional dan proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Perpres maupun Inpres. Perencanaan dan pemrograman di Ditjen Cipta Karya dilakukan dengan memberikan skala prioritas program pada kegiatan yang bersifat lanjutan (MYC), Direktif Presiden, Aspirasi Kemitraan, Komitmen Kementerian PUPR, Program Kerakyatan, dan Pemenuhan Renstra serta RPJMN berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, usulan program yang berasal dari pemerintah daerah dilaksanakan dalam

rangka menjaring kebutuhan infrastuktur permukiman di daerah dan disusun skala prioritasnya melalui sinkronisasi program yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah di masing-masing provinsi.

Seluruh usulan program baik yang bersifat *top-down* (seperti MYC, Direktif Presiden, Aspirasi Kemitraan, Komitmen Kementerian PUPR, Program Kerakyatan) maupun usulan program yang bersifat *bottom-up* (seperti program yang merupakan usulan pemerintah daerah) dikonsolidasikan dan disusun skala prioritasnya dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran (*Budget Constraint*).

Bagaimana fokus program Ditjen Cipta Karya dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dan sektor lain?

Fokus program Direktorat Jenderal Cipta Karya pada periode 2020-2024 dititikberatkan pada upaya pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, terutama pada wilayah dengan tingkat kerawanan air minum dan sanitasi yang tinggi serta penanganan kawasan permukiman tidak layak huni di perkotaan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya untuk melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur, baik di lingkup sektor PUPR maupun dengan sektor lainnya,



Dirjen Cipta Karya dalam kunjungan lapangan di Danau Toba

Sumber: Kompu Ditjen Cipta Karya

dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik di lingkup antar unit organisasi di Kementerian PUPR maupun K/L terkait lainnya melalui program pengembangan kawasan. - Selain itu, Ditjen Cipta Karya mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur yang sifatnya memerlukan penanganan dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, secara rutin Ditjen Cipta Karya melaksanakan sinkronisasi dengan Ditjen SDA dalam upaya memanfaatkan air baku untuk kebutuhan air minum.

Pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya dilakukan secara kolaboratif dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sinkronisasi perencanaan dan pemrograman. Pelaksanaan fungsi perencanaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan melalui penyusunan pedoman dan fasilitasi penyusunan dokumen Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman (SPKP). Dokumen SPKP ini disusun oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Dokumen SPKP disusun dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, serta berbasis pada kebutuhan daerah dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur permukiman. Keluaran dokumen SPKP adalah rencana program pembangunan infrastruktur

permukiman yang selanjutnya disusun skala prioritas penanganannya sesuai kebijakan pemrograman tahunan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Melalui dokumen SPKP ini, keterpaduan antar sektor di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat terwujud melalui satu dokumen acuan rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang disusun secara inklusif melalui pelibatan peran Pemerintah Daerah dalam penyusunannya.

Bagaimana idealnya keterpaduan infrastruktur dilakukan, sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat?

Saat ini, kawasan permukiman dihadapkan pada beragam permasalahan baik lingkungan/fisik, sosial, dan ekonomi. Keterpaduan Infrastruktur menjadi salah satu pendekatan atau strategi untuk menjawab beragam permasalahan tersebut di atas serta untuk merespon tantangan ketersediaan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, serta bencana alam.

Keterpaduan Infrastruktur Permukiman akan memberikan manfaat secara luas terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan polusi, meningkatkan kualitas lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup.

Keterpaduan infrastruktur permukiman harus berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan pengembangan



"Ditjen Cipta Karya bersama pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur permukiman sesuai peran dan kewenangannya"

Sumber: Kompu Ditjen Cipta Karya

sektor penggerak perekonomian wilayah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sektor pelayanan dasar yang perlu dipenuhi adalah perumahan, air minum dan sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan infrastruktur penunjang lainnya, seperti pengembangan kawasan dan konektivitas.

Pengembangan kawasan permukiman memerlukan perencanaan yang terpadu dengan instrumen atau tools yaitu dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang disusun dengan prinsip keterpaduan antar sektor, berbasis tata ruang dan pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dokumen RKP disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai acuan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Adapun muatan RKP, sebagai berikut:

- Kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman;
- Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- Rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan d. Indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman.

Dokumen RKP merupakan produk yang menjadi acuan bersama baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan demi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman dilaksanakan pada setiap tahap penyelenggaraan kawasan permukiman yang meliputi keterpaduan perencanaan, keterpaduan pembangunan, keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian. Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Kawasan Permukiman perlu dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip integrasi sistem, sinkronisasi program, serta koordinasi dan kolaborasi kelembagaan.

Ditjen Cipta Karya bersama pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur permukiman sesuai peran dan kewenangannya untuk dapat mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

BPIW bersama dengan Unor dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah menghasilkan produk seperti *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* untuk mendukung KSPN Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika. Bagaimana Ditjen Cipta Karya memanfaatkan produk ITMP tersebut?

Pariwisata telah ditempatkan sebagai salah satu sektor prioritas melalui penetapan sepuluh destinasi prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan lima destinasi super prioritas. Dari kesepuluh Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), enam diantaranya merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, sedangkan empat destinasi lainnya dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

ITMP ini menjadi acuan Ditjen Cipta Karya dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur permukiman dan sekaligus menjadi instrumen keterpaduan perencanaan dan pemrograman dalam mengembangkan sektor pariwisata di destinasi prioritas yang telah ditetapkan.

Produk ITMP yang disusun BPIW bersama antar unit organisasi maupun K/L terkait, dapat menjadi acuan yang sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi, juga mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2020-2024.

Apa saran Ibu terhadap produk yang dihasilkan oleh BPIW agar lebih dapat dimanfaatkan oleh Unor-unor?

BPIW memiliki peran strategis dalam menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan melalui perencanaan (*planning*) yang terpadu dan sinkronisasi program (*programming*) infrastruktur PUPR (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana).

Pembangunan infrastruktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan pendekatan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang dituangkan dalam dokumen *Masterplan and Development Plan (MPDP)* perlu mengoptimalkan keterpaduan dengan dokumen sektoral lain di luar Kementerian PUPR seperti kebijakan tata ruang, rencana pengembangan transportasi, dan rencana pengembangan sektor ekonomi unggulan di masing-masing wilayah.

Selain itu, MPDP sebagai produk Kementerian PUPR dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan, perlu disusun dengan lebih mengedepankan keterpaduan antar sektor di lingkungan Kementerian PUPR. Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Harapan kami tentunya produk perencanaan BPIW semakin meningkat kualitasnya dengan penajaman data dan informasi yang andal. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan BPIW, kami di Ditjen Cipta Karya juga berharap dapat lebih dilibatkan, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan BPIW dapat lebih optimal dalam hal kesesuaian penetapan indikasi program dengan kebutuhan Ditjen Cipta Karya.

Apa harapan Ibu terhadap BPIW ke depan dalam kaitannya dengan menterpadukan pembangunan infrastruktur PUPR?

BPIW sebagai koordinator dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR perlu memperkuat perannya dalam upaya mengimplementasikan pembangunan yang telah direncanakan, diantaranya melalui kajian yang memuat aspek teknis maupun non teknis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah, misalnya dengan kajian ketersediaan lahan untuk pembangunan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola aset infrastruktur yang dibangun.

Harapannya, unit organisasi sektoral di Kementerian PUPR dapat memanfaatkan kajian tersebut dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam rencana program tahunannya.

BPIW diharapkan dapat menjadi unit organisasi penjuror dalam menterpadukan pembangunan infrastruktur baik untuk sektor PUPR maupun dengan sektor-sektor lainnya dalam upaya pengembangan wilayah. Harapannya, keterpaduan pembangunan infrastruktur dapat terwujud melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. **(Hendra)**

Pengembangan Metropolitan Banjarbakula: Tantangan dan Momentum Mewujudkan Kawasan Perkotaan yang Adaptif Terhadap Resiko Bencana

Oleh: Aditya Wilis Yogatama Nugraha, ST

Posisi Strategis Metropolitan Banjarbakula

Wilayah Banjarbakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan atau juga disebut sebagai Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin merupakan salah satu kawasan metropolitan yang menjadi fokus pembangunan nasional. Amanat pengembangan Metropolitan Banjarbakula tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, Metropolitan Banjarbakula juga menjadi salah satu dari 10 kawasan metropolitan di Indonesia yang perlu mendapat prioritas pengembangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Sebagai episentrum kegiatan yang menaungi 52,23 persen penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Metropolitan Banjarbakula menjadi wilayah yang mendominasi dalam hal kontribusi



Kontribusi PDRB Banjarbakula Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2019
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Tercatat setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2019) Metropolitan Banjarbakula memegang proporsi terbesar terhadap total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi sebesar 41,3 persen. Adapun pada tahun 2019 total PDRB kabupaten/kota yang masuk dalam Kawasan Metropolitan Banjarbakula mencapai 56.758,14 milyar rupiah atau sekitar 42,9 persen dari total Provinsi Kalimantan Selatan dimana proporsi terbesar masih berada di Kota Banjarmasin (16,8 persen).

Tantangan Pengembangan Metropolitan Banjarbakula

Dalam proses pengembangannya, Metropolitan Banjarbakula dihadapkan oleh beberapa tantangan terutama terkait dengan posisi Kota Banjarmasin sebagai pusat kawasan metropolitan. Menjadi konsentrasi penduduk dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,79 persen per tahun atau diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dihadapkan oleh isu dan permasalahan kemacetan lalu lintas, munculnya permukiman-permukiman kumuh, pencemaran sungai, hingga kebutuhan akan peningkatan infrastruktur dasar.

Meskipun telah didukung dengan jalan nasional yang memiliki kondisi 99,36 persen mantap, secara umum perlu ada peningkatan kualitas

jaringan jalan di Kota Banjarmasin. Tercatat 31,41 persen jalan di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi rusak hingga rusak berat. Selain itu, kemacetan juga masih menjadi isu strategis dalam pengembangan Metropolitan Banjarbakula, yang mana terdapat beberapa titik kemacetan termasuk pada jalan nasional seperti pada ruas Jalan H. Hasan Basri yang terpantau memilik V/C rasio sebesar 1,74. Pada aspek permukiman, meskipun sudah dalam posisi yang baik dengan capaian akses air minum layak sebesar 91,73 persen dan capaian akses sanitasi layak sebesar 80,66 persen, peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi juga berpengaruh terhadap munculnya permukiman kumuh terutama pada sepanjang Sungai Martapura dan Sungai Barito di jantung Kota Banjarmasin. Keberadaan permukiman kumuh dengan kualitas sarana persampahan dan sanitasi yang buruk turut memperparah pencemaran sungai yang tercatat telah berada di kategori 'cemar ringan-sedang' untuk Sungai Martapura dan kategori 'cemar berat' untuk Sungai Barito di tahun 2015 (Status Kualitas Air Sungai Tahun 2015, Badan Pusat Statistik).

Konsep Pengembangan Metropolitan Banjarbakula

Struktur Kawasan Metropolitan

Sebagai kawasan Metropolitan, Pusat kegiatan Banjarbakula berada di Kota Banjarmasin

Info Pengembangan Wilayah



Gambaran Kondisi Keberadaan Permukiman Kumuh di Sepanjang Sungai Martapura
Sumber: Hasil Pelaksanaan Survey Lapangan Tahun 2019, BPIW

dan didukung oleh beberapa simpul dengan karakter perkotaan dan/atau kawasan dengan fungsi lainnya (industri hingga pertanian/agribisnis). Martapura (Banjarbaru), Jorong (Tanah Laut), dan Marabahan (Barito Kuala) merupakan simpul-simpul pendukung strategis yang perlu dipertimbangkan arah pengembangannya sebagai satu kesatuan pengembangan Metropolitan Banjarbakula. Beberapa isu strategis pengembangan simpul-simpul pendukung Kota Banjarmasin sebagai pusat kegiatan Banjarbakula antara lain:

a. Martapura (Kab. Banjarbaru)

Isu Strategis:

- Banjarbaru sebagai pendukung utama Kota Banjarmasin (simpul permukiman, pengembangan Syamsudin Noor kearah *Aerocity*, hingga pengembangan kawasan pariwisata)
- Kebutuhan penataan kota yakni bangunan dan RTH (RTH belum mencapai 30%)
- Penyediaan Infrastruktur dasar (air, sanitasi, persampahan) dan penanganan kumuh

Sebaran Simpul/Kawasan Strategis dalam Struktur Metropolitan Banjarbakula

Sumber: RTRWN; Rencana Induk Pelabuhan Nasional; Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional; Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional; Masterplan, Development Plan, dan Studi Penetapan Kawasan Metropolitan Banjarbakula (2017)



b. Simpul Industri Jorong (Kab. Tanah Laut)

Isu Strategis:

- Pengembangan KI terkendala pembebasan lahan dan belum adanya investor kawasan industri
- Prospek pengembangan industri berbasis tambang dan agribisnis

c. Marabahan (Kab. Barito Kuala)

Isu Strategis:

Prospek pengembangan agribisnis (Kabupaten

Barito Kuala menjadi salah satu daerah potensi lumbung pangan)

Strategi Penanganan, Indikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Infastruktur Kunci (Key Infrastructure)

Masterplan pengembangan infrastruktur Kawasan Metropolitan Banjarbakula hingga Tahun 2028 telah disusun BPIW pada tahun 2017. Dalam mengoptimalkan fungsi Kawasan Metropolitan Banjarbakula, adapun strategi penanganan, indikasi dan rencana infrastruktur kunci tiap simpul kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Banjarmasin (Pusat Metropolitan, PKN)

Fokus Penanganan Utama:

Antisipasi *Over Capacity* Kota (Penanganan Kemacetan, Pencemaran Sungai, Permukiman Kumuh, Kebutuhan Infrastruktur Dasar), Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, dan Mitigasi Bencana.

Strategi Pengembangan Infrastruktur Kunci:

- Pengembangan jalan lingkaran/FO/UP
 - Penataan Kawasan Tepi Sungai (*Waterfront City*)
 - Penanganan permukiman kumuh
 - Penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, persampahan)
- Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Kunci (Major):*
- Pembangunan Jalan Lingkar Utara
 - Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti – Alalak – Trans Kalimantan
 - Pembangunan Jembatan Barito II
 - Normalisasi Sungai Martapura
 - Penataan Kawasan Kelayan (*Waterfront* Sungai Martapura)

b. Martapura/Banjarbaru (PKW) dan Kawasan Industri Jorong

Fokus Penanganan:

Penguatan keterkaitan dengan Kota Banjarmasin (Simpul Pendukung), penyedia infrastruktur skala regional Banjarbakula, serta mendorong optimalisasi pembangunan KI Jorong

Strategi Pengembangan Infrastruktur Kunci:

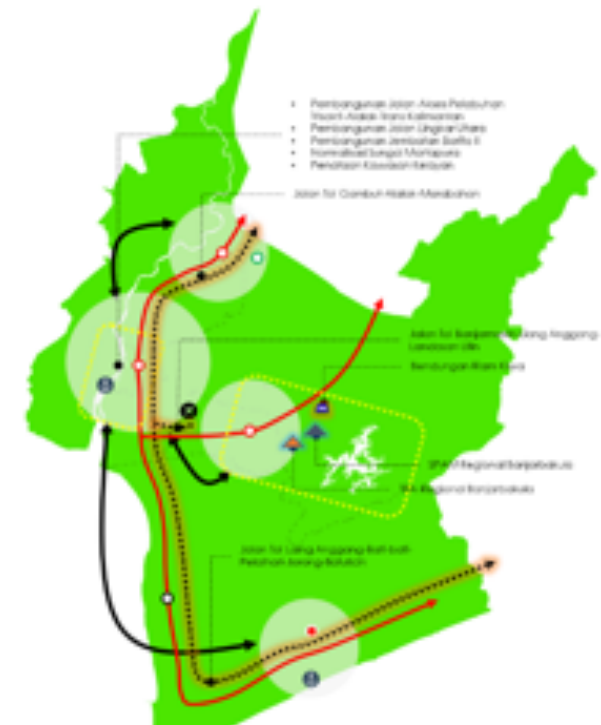
- Pengembangan jalan untuk memperkuat konektivitas

- Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Baku
 - Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Persampahan Skala Regional
- Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Kunci (Major):
- Pembangunan Jalan Tol Ruas Banjarmasin-Liangggang-Landasan Ulin
 - Pembangunan Jalan Tol Lintas Selatan Liang Anggang-Batibati-Pelaihari-Jorong-Batulicin
 - Pembangunan Bendungan Riam Kiwa
 - Pembangunan SPAM Regional Banjarbakula (tahap I sudah beroperasi)
 - Pembangunan TPA Regional Banjarbakula (sudah beroperasi)

c. Marabahan (PKW)

Fokus Penanganan:

Penguatan keterkaitan dengan Kota



Banjarbakula sebagai simpul pendukung terutama pada spesialisasi simpul pertanian/agribisnis (KPPN Marabahan).

Strategi Pengembangan Infrastruktur Kunci:

- Pengembangan jalan untuk memperkuat konektivitas

Info Pengembangan Wilayah

- Pengembangan infrastruktur air baku, irigasi dan mendukung pengembangan kawasan pedesaan
- Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Kunci (*Major*):
- Pembangunan Jalan Tol Lintas Utara Gambut-Alalak-Marabahan

Bencana Banjir: Tantangan Baru Pengembangan Banjarkakula

Kejadian bencana banjir yang menerjang setidaknya 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan cukup menjadi perhatian nasional di awal tahun 2021. Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Barito Kuala tercatat menjadi wilayah yang terdampak banjir Provinsi Kalimantan Selatan. Bencana banjir setidaknya memaksa 112.709 jiwa mengungsi dan 27.111 rumah harus terendam banjir (Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, BNPB, Status 16 Januari 2021). Dalam kerangka jangka pendek, Presiden mengarahkan setidaknya tiga langkah pemulihan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yakni percepatan peningkatan konektivitas untuk membuka daerah terisolir, mempercepat evakuasi, dan jaminan ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak banjir. Merespon hal tersebut, selain memberikan dukungan peralatan, Menteri PUPR juga telah menginstruksikan untuk perbaikan beberapa jembatan yang rusak untuk pemulihan konektivitas. Adapun diantaranya adalah Jembatan Tabunio II

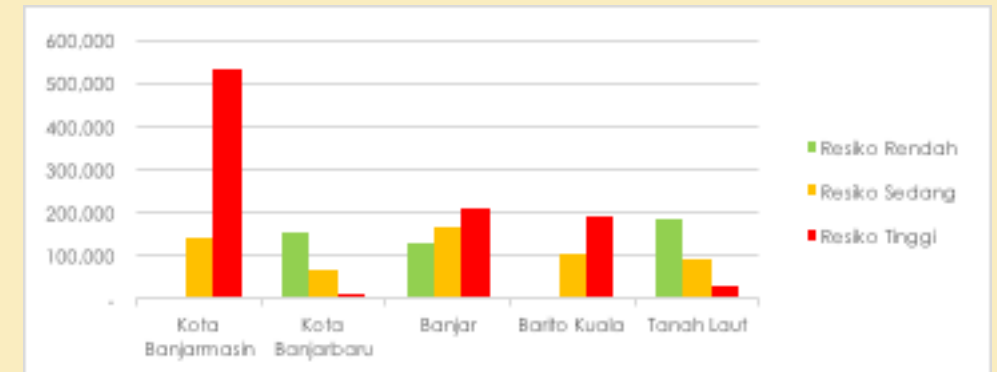
(lintas selatan Kalimantan Selatan Sp. Liang Anggang-Pelaihari-Batulicin) dan Jembatan Sungai Salim (lintas tengah Kalimantan Selatan Banjarmasin-Tanjung-Batas Provinsi Kalimantan Timur).

Berangkat dari musibah ini, aspek kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang esensial dalam memperkuat dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Metropolitan Banjarkakula yang telah tersusun utamanya dalam mewujudkan Kota Berketahanan (*Resilience City*) dan Infrastruktur Berkelanjutan (*Sustainable Infrastructure*). Kualitas kota berketahanan setidaknya ditentukan oleh kemampuan untuk belajar (*Reflective*), adanya strategi alternatif (*Flexible*), kemampuan untuk mengatur sumber daya (*Resourceful*), komunikasi dan konsultasi dan inklusif (*Inclusive*), kekuatan meminimalisir kegagalan (*Rebust*), sistem yang terpadu (*Integrated*) dan mempunyai kapasitas cadangan (*Redundant*). Sedangkan perwujudan infrastruktur berkelanjutan setidaknya mencakup enam indikator antara lain:

- a. Peningkatan akses pada pelayanan dasar yang bertujuan mewujudkan pemerataan (*Benefit Sharing*);
- b. Memperhatikan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim (*Environmental Resilience*);
- c. Melibatkan seluruh stakeholder terkait dan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal (*Social Acceptability*)



Kunjungan Menteri PUPR dan Penanganan Jembatan Dampak Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber: pu.go.id



Jumlah Penduduk dengan Resiko Bencana Banjir Tiap Kabupaten/Kota di Wilayah Banjarkakula
Sumber: Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2016, BNPB (diolah)

d. Memperhatikan kelayakan ekonomi dan didukung oleh regulasi yang transparan (*Economic & Institutional Effectiveness*)

e. Siklus pengelolaan/perawatan infrastruktur yang direncanakan dengan mempertimbangkan peluang penggunaan teknologi untuk mengurangi resiko (*Future Proofing*)

f. Didukung dengan perencanaan strategis hingga ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan (*Critical Mass Potential*)

Penguatan yang lebih intensif ini menjadi penting mengingat pada dasarnya persentase jumlah penduduk dengan resiko tinggi terdampak bencana banjir di beberapa kabupaten/kota terutama yang berada di wilayah Banjarkakula cukup besar.

Berdasarkan Kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2016 oleh BNPB, sebesar 48,44 persen penduduk kabupaten/kota di Banjarkakula memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir. Adapun Kota Banjarmasin menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak yang masuk dalam resiko tinggi bencana banjir dengan 532.482 jiwa atau sekitar 54,46 persen dari total penduduk yang masuk dalam kategori tinggi di Kawasan Banjarkakula.

Referensi:

1. *Masterplan, Development Plan, dan Studi Penetapan Kawasan Metropolitan Banjarkakula, BPIW, 2017*
2. *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021*
3. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2010-2019, Badan Pusat Statistik*
4. *Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tahun 2016*
5. *City Resilience Index: Understanding and Measuring City Resilience, The Rockefeller Foundation-ARUP*
6. *Global Future Council on Infrastructure: Six Qualities of Sustainable Infrastructure, World Economic Forum, 2020*

Kementerian PUPR Lakukan Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur

RAKORBANGWIL
BIDANG PUPR
2021



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR, mulai 17 hingga 23 Februari 2021.

Kegiatan tersebut digelar dengan metode *hybrid* dan *online* yang melibatkan 15 Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Suchayono menyatakan tujuan dilaksanakannya Rakorbangwil ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung keterpaduan program pengembangan wilayah.

Fokus pelaksanaan Rakorbangwil bidang PUPR ini untuk mendapatkan rumusan Kawasan Strategis dan Usulan Program Prioritas

Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2022 sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) PUPR 2020-2024, dengan mempertimbangkan rencana strategis sektoral serta kebijakan Pimpinan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh pejabat tinggi madya/pratama terkait untuk ditindaklanjuti bersama.

Menurut Hadi, pelaksanaan diskusi dibagi menjadi beberapa bagian yakni Klaster Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA), Program Infrastruktur Konektivitas, Program Kawasan Permukiman, dan Program Perumahan.

Pada Pembukaan Rakorbangwil 17 Februari lalu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR, M. Zainal Fatah mengatakan, Rakorbangwil merupakan momen penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar K/L untuk penyiapan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022. Hal ini penting dilaksanakan mengingat adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan

Sorot

nasional di berbagai sektor, utamanya infrastruktur. Lebih lanjut, masukan dari berbagai perwakilan K/L akan menjadi bahan penting untuk merumuskan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang selaras dengan kebijakan K/L terkait.

Pada hari pertama pembukaan Rakorbangwil, menghadirkan beberapa narasumber yakni Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Josaphat Rizal Primana, Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna, Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Hariyawan, serta Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono.

Rakorbangwil hari kedua digelar secara virtual pada Kamis, 18 Februari membahas terkait Kebijakan dan Program Ketahanan Sumber Daya Air menghadirkan narasumber yakni Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Rahmanto, Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Marrahmat, dan Sekretaris Ditjen SDA Kementerian PUPR, Charisal Akdian Manu. Pada sesi siang, dibahas secara detail program-program K/L terkait. *Online meeting* tersebut dihadiri Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA Direktorat Jenderal SDA, Niken Puspitasari.

Selanjutnya hari ketiga Rakorbangwil yang juga digelar secara *online*, Jumat, 19 Februari, membahas mengenai program infrastruktur terkait konektivitas. Pembahasan program infrastruktur tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian.

Pada sesi pagi, diisi paparan dari Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito. Narasumber lainnya adalah Sesditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Marta Hardisarwono dan Plt. Kasi Perencanaan Teknik Fasilitas Pelabuhan Tony Dzakir. Dari pihak Kementerian PUPR

menghadirkan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Sesi siang dilanjutkan dengan pembahasan detail program-program K/L terkait. Kegiatan ini dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Benny Hermawan. Turut hadir dalam pertemuan secara *virtual* yang diikuti 100 peserta ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Miftachul Munir, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, dan Plt. Kasubag Program Setdijen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Windi Susilawati.

Senin, 22 Februari 2021 Rakorbangwil membahas program infrastruktur terkait permukiman (Cipta Karya). Pada pembahasan Sesi pagi, diisi dengan paparan para narasumber, diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti dan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kemenparekraf, Hari Santoso Sungkari.

Narasumber lainnya adalah Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kemenkes, Andi Saguni, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Kemendagri Indra Maulana. Kemudian, pembahasan Sesi siang dilakukan pembahasan detail program-program K/L terkait.

Sedangkan pada hari kelima Rakorbangwil, Selasa 23 Februari 2021, membahas mengenai Kebijakan dan Program Perumahan dengan ,enghadirkan beberapa narasumber yakni Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto.

Dari pihak Kementerian Sosial, Rakorbangwil dihadiri tiga Dirjen yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto. Selain itu hadir pula Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian



Pleno Rakorbangwil bidang PUPR 2021

Sosial, Adhy Karyono dan Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Dalam Negeri, Nita Rosalin.

Sesi siang yang moderatori Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Benny Hermawan, dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.

Rakorbangwil kemudian ditutup oleh Kepala BPIW dengan ucapan terima kasih kepada seluruh Kementerian Lembaga yang telah hadir sejak hari Pertama dan mengikuti serta mendukung kelancaran berlangsungnya Rakorbangwil Kementerian PUPR yang pertama kali diselenggarakan, sebagai mekanisme baru dalam proses perencanaan infrastruktur wilayah yang dicanangkan untuk skala nasional lintas K/L dan Daerah.

Sebagai tindak lanjut, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan serta pokok-pokok isu yang dibahas selama Rakorbangwil menjadi bahan untuk pembahasan pada forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR, forum bilateral selanjutnya, serta forum sinkronisasi

Hasil-hasil diskusi dan kesepakatan serta pokok-pokok isu yang dibahas selama Rakorbangwil menjadi bahan untuk pembahasan Konsultasi Regional Kementerian PUPR

pemrograman lainnya, mencakup kawasan-kawasan strategis serta indikasi program yang telah disepakati agar dipastikan manfaatnya bagi pemenuhan target pemerintah sesuai RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, serta kebijakan Pimpinan Nasional.

MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN PUPR

Oleh : Iwan Nurwanto
Eko Susanto
Ari Purwani

Dalam mendukung terwujudnya manajemen PNS yang mampu menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan didukung PNS yang kompeten, berkualitas, dan profesional, pemerintah perlu mengembangkan lebih banyak lagi jabatan fungsional sebagai jabatan profesi dibandingkan jabatan struktural atau jabatan administrasi. Saat ini, struktur birokrasi hanya 2 (dua) level saja dan diganti dengan jabatan fungsional yang bekerja dengan basis kompetensi dan bidang keahlian.

Dengan ditetapkannya Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, jabatan administrasi diganti dengan jabatan fungsional. Harapan dari perampingan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik ini yaitu mempercepat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

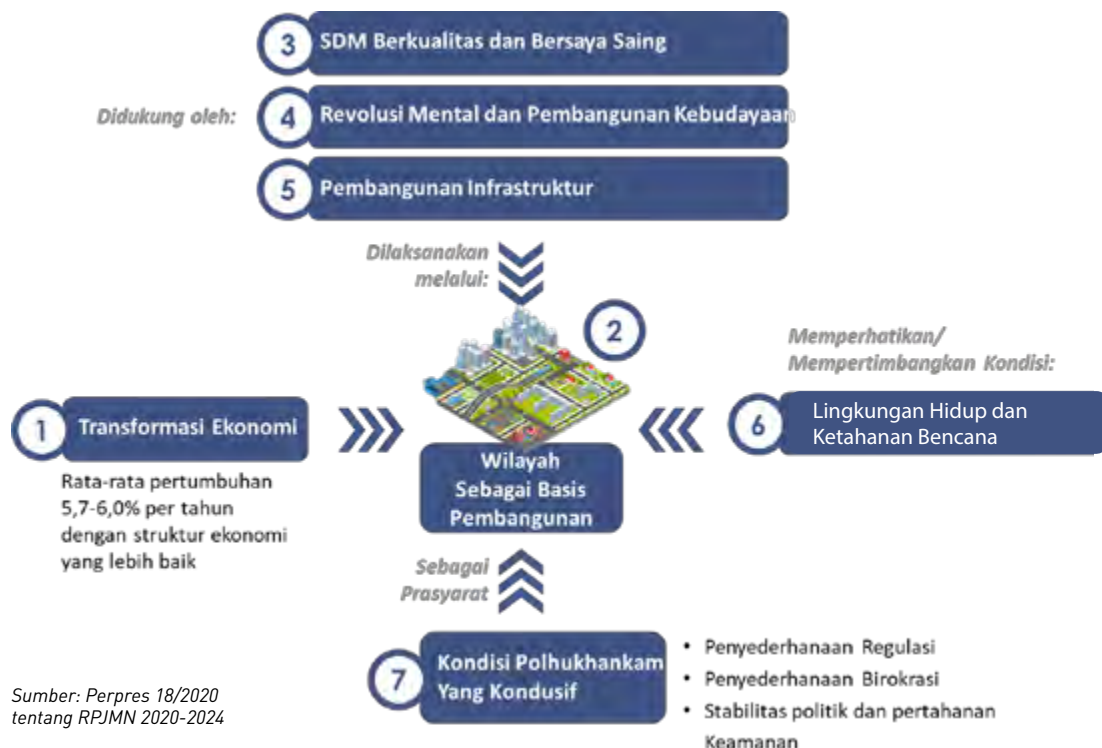
Nomenklatur jabatan fungsional telah mencerminkan kualifikasi profesionalnya, yaitu jenjang Jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Setiap jenjang jabatan memiliki standar kompetensi dan bidang keahlian yang spesifik sesuai dengan lingkup tugas jabatannya. Salah satu jenis jabatan fungsional tertentu yaitu Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dengan fungsi pembinaan dan pengembangan dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas selaku Instansi Pembina JFP.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional telah mengubah pendekatan dan paradigma dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yaitu: (1) sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasi-

onal; (2) pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*); dan (3) pendekatan THIS (*Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*). Pendekatan THIS diharapkan menghasilkan rencana pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang terpadu, pembangunan yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, pembangunan yang lebih efisien dalam waktu dan pembiayaan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan dan paradigma baru ini mengubah cara berfikir dan cara bekerja perencana pembangunan di instansi pusat dan di instansi daerah. Peran perencana pembangunan yaitu sebagai kolaborator, analis, pembimbing, dan penasehat dalam proses perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan pada setiap instansi pemerintah.

Gambar 1. Kerangka Pikir Agenda Pembangunan Nasional



Sumber: Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

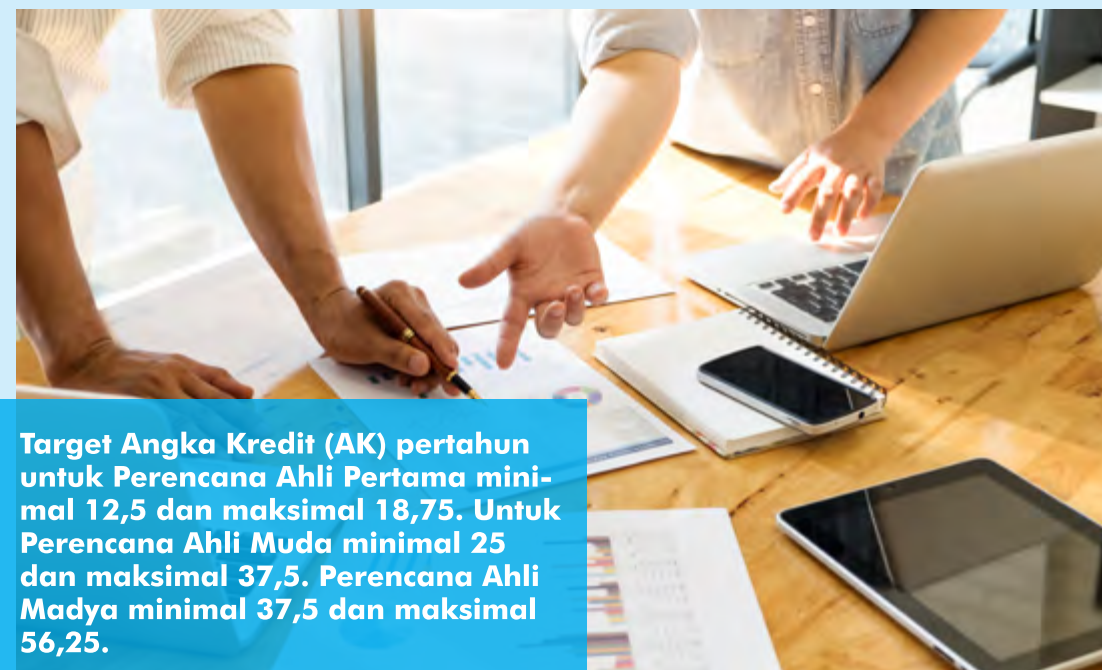
Jabatan Fungsional Perencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017, kedudukan jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JFT. Pejabat Fungsional Perencana bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam mendukung upaya peningkatan profesionalitas PNS dan kualitas perencanaan nasional tersebut diatas, disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana meng-

gantikan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengangkatan ke dalam JFP mempunyai ketentuan, yaitu dapat diangkat melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain atau dapat melalui promosi jabatan.

Pengangkatan pertama pada JFT dapat melalui pembukaan formasi CPNS dan wajib diangkat ke dalam Perencana Ahli Pertama, maksimal 1 tahun. Pengangkatan pertama pada JFT dapat dilakukan paling lama 3 tahun dan wajib mengikuti serta lulus Pelatihan Fungsional Perencana Pertama. Apabila belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional, maka pegawai tersebut diberhentikan dari jabatannya. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain yaitu JPT/Administrator/ Pengawas/JFT Lain sebaiknya mempunyai



Target Angka Kredit (AK) pertahun untuk Perencana Ahli Pertama minimal 12,5 dan maksimal 18,75. Untuk Perencana Ahli Muda minimal 25 dan maksimal 37,5. Perencana Ahli Madya minimal 37,5 dan maksimal 56,25.

pengalaman di bidang perencanaan minimal 2 tahun, dengan usia maksimal 53 tahun untuk JFP Ahli Pertama dan Muda, 55 tahun untuk Ahli Madya, dan 60 tahun untuk JFP Utama. Pada akhirnya, pengangkatan senantiasa mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan fungsional perencana dan dilakukan uji kompetensi (Pasca-Pelatihan JFP).

Dalam hal kenaikan pangkat, mekanisme JFP dari III/a sampai III/c dibutuhkan Angka Kredit (AK) kumulatif sebanyak 50 tiap jenjangnya. Sedangkan untuk kenaikan pangkat JFP dari III/c sampai IV/a dibutuhkan Angka Kredit (AK) kumulatif sebanyak 100 tiap jenjangnya. Kenaikan pangkat IV/a sampai IV/d dibutuhkan Angka Kredit (AK) kumulatif sebanyak 150 tiap jenjangnya dan untuk kenaikan pangkat IV/d ke IV/e dibutuhkan Angka Kredit (AK) kumulatif sebanyak 200.

Target Angka Kredit (AK) pertahun untuk Perencana Ahli Pertama minimal 12,5 dan maksimal 18,75. Untuk Perencana Ahli Muda minimal 25 dan maksimal 37,5. Perencana Ahli Madya minimal 37,5 dan maksimal 56,25. Angka Kredit minimal pertahun untuk Peren-

cana Ahli Utama sebesar 50 dan maksimal 75. Pemenuhan AK minimal pertahun bertujuan agar JFP tetap mendapatkan kenaikan pangkat dalam 4 tahun, sedangkan pemenuhan AK maksimal pertahun agar JFP mendapatkan kenaikan pangkat dalam 3 tahun.

Komponen kegiatan pada AK minimal terdiri atas 100% dari unsur perencanaan dan maksimal 150% dari unsur perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Selain itu, 6 AK dengan unsur pengembangan profesi diwajibkan bagi perencana Ahli Muda yang akan menjadi Ahli Madya serta makalah kebijakan (*policy paper*) yang sudah diterbitkan di tingkat internal instansi sebagai persyaratan Hasil Kerja Minimal (HKM). Selanjutnya, 12 AK dengan unsur pengembangan profesi diwajibkan bagi perencana Ahli Madya yang akan menjadi Ahli Utama serta makalah kebijakan (*policy paper*) yang sudah diterbitkan di tingkat Nasional/Internasional.

JFP diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Perencana dan Tunjangan Kinerja setara dengan *grade* 8 untuk tingkat Ahli Pertama, *grade* 9 untuk Ahli Muda, *grade* 11 untuk Ahli

Serba-Serbi

Madya, dan 13 untuk Ahli Utama. Penilaian kinerja dalam JFP diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa (1) penilaian AK terintegrasi dengan Penilaian Kinerja; (2) tidak ada pembebasan sementara akibat tidak mampu mengumpulkan AK, namun terdapat evaluasi tahunan; (3) direncanakan penilaian AK melalui e-Dupak. Kinerja JFP dinilai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), SKP realisasi, penilaian perilaku, dan Hasil Kerja Minimal* (Untuk JFP Madya dan Utama).

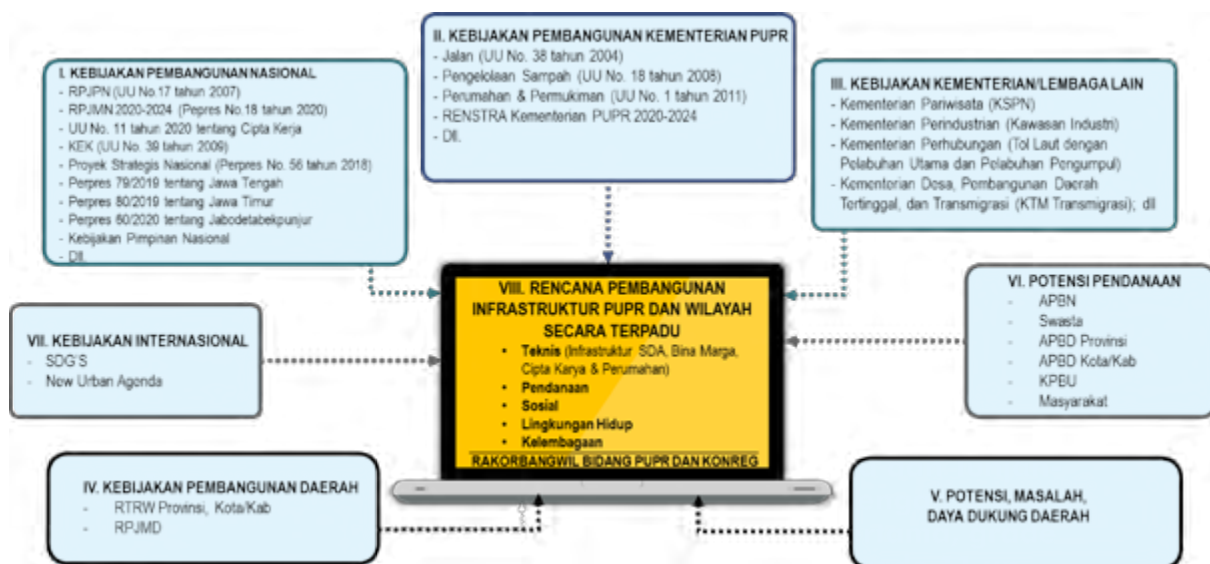
Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian PUPR

BPIW sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infra-

struktur dapat terwujud yang dengan sinergis baik antarsektor, antardaerah, dan antarperintahan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan tidak dilakukan semata-mata oleh BPIW akan tetapi melibatkan semua pihak baik internal maupun eksternal. Peran BPIW sebagai *think tank* yang memberikan masukan kepada Menteri PUPR, sebagai fasilitator *debottlenecking* dalam pembangunan infrastruktur PUPR, serta sebagai integrator perencanaan dan program infrastruktur PUPR yang terpadu dan sinkron, sehingga saat ini BPIW ditetapkan sebagai unit organisasi Pembina JFP di Kementerian PUPR melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1206/KPTS/M/2020 tanggal 22 Juli 2020. Di BPIW sendiri, Sekretariat Badan yang akan membantu mengakomodasi dalam pembinaan Jafung tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan infrastruktur, saat ini di Kementerian PUPR didukung oleh JFP yang berjumlah 53 orang, dengan rincian se-

Gambar 2. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah



Sumber: BPIW Kementerian PUPR



Verifikasi model perencanaan karir dilakukan dengan merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit pada setiap jenjang jabatan JFP berdasarkan bobot angka kredit yang besar dan memperhatikan batasan maksimal jumlah kegiatan yang dapat dilakukan dalam setahun.

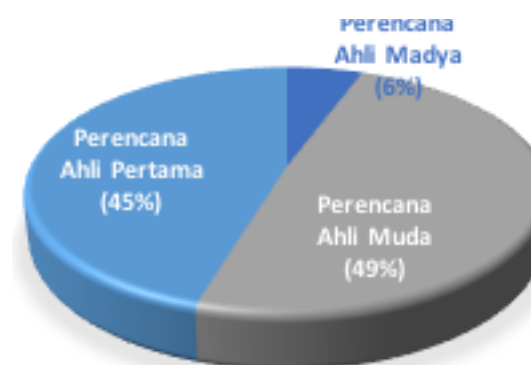
bagai berikut: Perencana Ahli Madya sebanyak 3 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 26 orang, dan Perencana Ahli Pertama sebanyak 24 orang (status: 20 Februari 2021). Sesuai dengan formasi di Kementerian PUPR, masih diperlukan JFP sebanyak 336 orang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan para perencana ini ke depan adalah perencanaan karir JFP yang harus dirancang dengan baik, antara lain terkait den-

tuk mendapatkan kesesuaian kegiatan yang dilakukan dan kemudahan implementasi.

Verifikasi model perencanaan karir dilakukan dengan merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit pada setiap jenjang jabatan JFP berdasarkan bobot angka kredit yang besar dan memperhatikan batasan maksimal jumlah kegiatan yang dapat dilakukan dalam setahun. Dari verifikasi model yang dilakukan diketahui bahwa model yang dirancang sudah sesuai untuk perencanaan karir JFP. Selain itu, perlu dirumuskan waktu ideal yang dibutuhkan JFP untuk naik pangkat/jabatan, sehingga diharapkan JFP di Kementerian PUPR memiliki tempat dengan kompetensi dan penilaian yang sesuai dengan keahliannya. BPIW mendukung seluruh JFP yang ada di lingkungan Kementerian PUPR untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu.

Gambar 3. JFP di Kementerian PUPR (Status 20 Februari 2021)



Sumber: BPIW Kementerian PUPR

gan kesesuaian rancangan kegiatan pada unit organisasi, baik BPIW maupun Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Proses ini perlu divalidasi dengan meminta pendapat dari pakar (seperti Instansi Pembina JFP) un-

Panduan Dalam Upaya Pembangunan dan Tata Kelola Perkotaan



Judul Buku :

The New Urban Agenda

Penerbit : **UN-Habitat**

Tahun Terbit : 2020

Halaman : 194

ISBN : **978-92-1-132869-1**

Agenda Baru Perkotaan memberikan panduan yang jelas mengenai suatu hal yang terencana dan terkelola dengan baik. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini telah menginspirasi sebuah solusi baru yang membuat sebuah kota menjadi kunci dalam menangani keadaan darurat iklim, mengelola arus migrasi, memerangi pandemi dan tantangan global lainnya. Buku Ilustrasi Agenda Baru Perkotaan menawarkan definisi yang jelas dan aplikasi praktis untuk membuat kerangka kerja global lebih mudah diakses dan ramah bagi pengguna untuk membuat kebijakan perkotaan, baik dalam pemerintahan, maupun di seluruh berbagai pemangku kepentingan perkotaan dan di

dalam PBB. Kami membutuhkan pendekatan skala yang lebih praktis dan mempercepat langkah serta tindakan yang akan kita ambil.

NUA berfungsi sebagai akselerator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11 untuk menjadikan kota dan permukiman manusia secara inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kerangka kerja untuk memandu dan melacak urbanisasi di seluruh dunia. Menyadari fakta bahwa 95 persen pertumbuhan perkotaan akan terjadi di negara berkembang, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 menetapkan target dan mendefinisikan indikator untuk mengukur kemajuan dan pertumbuhan.



Penataan metropolitan memerlukan strategi komprehensif

Sumber: Istimewa

Di bab kedua ini dijelaskan bahwa kota dan wilayah merupakan dua sektor yang berbeda dalam menentukan pembangunan perkotaan agar dapat terjalin dengan baik. Sektor-sektor ini termasuk dalam perangkat keras seperti halnya transportasi, energi dan limbah infrastruktur dan juga perangkat lunak seperti budaya, pendidikan, dan Kesehatan serta langkah yang diperlukan untuk pemukiman perkotaan agar dapat berkembang dan hidup potensi penuh mereka. Sektor-sektor ini berinteraksi dan berkolaborasi melalui sistem pemerintahan yang berbeda dan mekanisme intervensi, yang beroperasi di lokal, regional dan tingkat nasional. Bab Dua menyediakan tinjauan menyeluruh atas sektor-sektor ini dan mekanisme yang mengatur dan mengoordinasikan mereka.

Agenda baru perkotaan menggaris bawahi betapa pentingnya sebuah perkembangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan efisien guna mengangkat infrastruktur agar dapat menghasilkan sebuah energi terbaharukan yang dapat menjangkau untuk mengurangi keuangan, lingkungan dan publik dengan biaya yang tidak efisien, kemacetan, polusi udara, panasnya perkotaan serta kebisingan.

Dalam mengelola air dan sektor sanitasi, agenda baru perkotaan berkomitmen untuk membangun kapasitas air minum dan juga sektor sanitasi agar dapat melakukan pengelolaan sistem air dengan adil dan memadai serta menjamin kebersihan untuk semua. Agenda baru perkotaan ini merupakan sumber budaya untuk pengayaan seluruh umat manusia, yang

terus berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya sebuah permukiman dan komunitas agar dapat berperan aktif.

Pada Bab ketiga pada buku ini menjelaskan mengenai mekanisme global dalam tata kelola yang telah ditetapkan untuk tindak lanjut dan review dari agenda baru perkotaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana dalam hal ini menyajikan pekerjaan yang sedang berlangsung di tingkat dunia untuk membangun secara lebih komprehensif kerangka pemantauan dan pelaporan, dimana akan difasilitasi oleh UN-Habitat. Proses ini akan memadu padankan antara anggota dan mitra, dalam koleksi dan analisis data perkotaan, serta melakukan tindakan identifikasi hasil yang dicapai pada semua tingkatan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Analisis kuantitatif dan data kualitatif dari seluruh dunia, disusun secara sistematis sebagai wadah untuk membangun Agenda Perkotaan. Dalam hal ini juga harus dimasukkan ke dalam Laporan Quadrennial mengenai agenda baru perkotaan yang baru untuk diserahkan kepada sekretaris Jenderal PBB, dan tentunya menginformasikan aksi global dan rekomendasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.

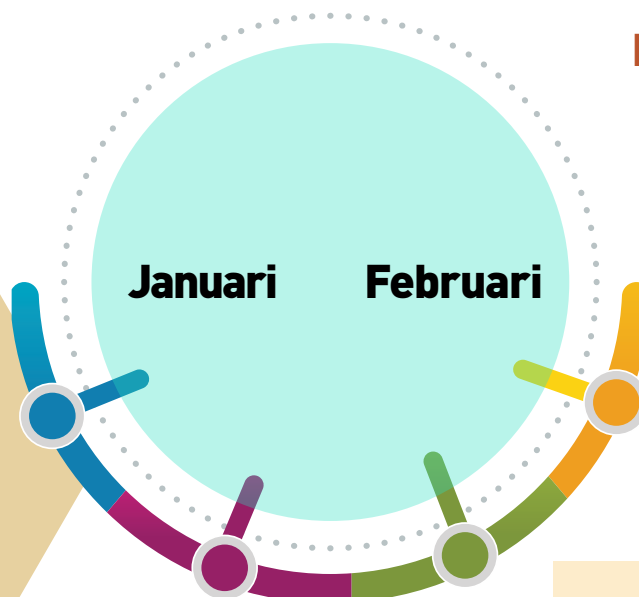
Agenda baru perkotaan menggarisbawahi betapa pentingnya sebuah kota dan juga pemerintahan didalamnya untuk dapat bertukar pengalaman mengenai kebijakan, program, serta pelajaran yang didapat agar dapat dipraktikkan dengan baik.

Komisi V Apresiasi BPIW



Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian BPIW untuk kinerja 2020 dan memahami penjelasan BPIW mengenai rincian program dan alokasi anggaran 2021. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Ditjen Cipta Karya dan BPIW yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae di Jakarta, Selasa 26 Januari 2021.

Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, pagu anggaran BPIW pada tahun anggaran 2021 mencapai total Rp 206 Miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja pegawai Rp 28,7 Miliar, belanja barang Rp 176,2 Miliar, belanja modal Rp 1,2 Miliar, belanja barang operasional Rp 21,9 Miliar, kegiatan swakelola Rp 65,6 Miliar serta kegiatan kontraktual 88,5 Miliar. (ris)



Dukungan Infrastruktur untuk Daerah

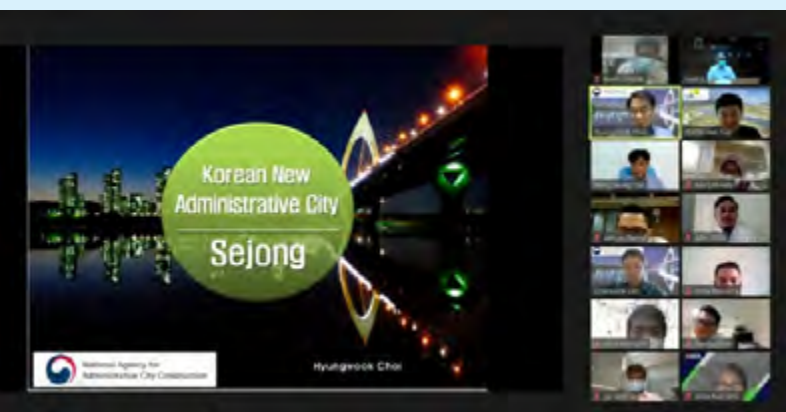


Kepala BPIW Hadi Sucahyono memastikan Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur sektor PUPR untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Nagekeo. Hal itu disampaikannya saat rapat pengembangan wilayah di empat kabupaten tersebut melalui *video conference*, Rabu, 20 Januari 2021. Rapat tersebut dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Lebih lanjut Hadi menjelaskan selama ini Kementerian PUPR menangani jaringan jalan di pantai timur yang merupakan jalan nasional di Kabupaten Mentawai Sumatera Barat. Direncanakan bagian barat juga akan ditangani Kementerian PUPR.

Indonesia-Korea Sharing Knowledge

BPIW Kementerian PUPR melakukan Sharing Knowledge bersama dengan perwakilan *Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT)* dan *National Agency for Administrative City Construction (NAACC)* Korea Selatan. Pihak Korea membagikan pengalaman mengenai pengembangan *Smart City* Sejong, Korea Selatan melalui *video conference (vicon)*, Selasa, 12 Januari 2021. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan latar belakang narasumber yang berbeda-beda, maka informasi yang didapat juga beragam,

seperti mengenai penyiapan lahan, kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan kota tersebut, desain kota, biaya, mengenai kelembagaan, dan skema pembiayaan. "Mereka mengembangkan *smart city* itu dengan melibatkan banyak kementerian. Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia juga melibatkan berbagai instansi," ungkap Hadi. Setelah pertemuan ini, akan dilakukan pertemuan selanjutnya yang akan melibatkan Tim Satgas IKN.



BPIW Muda Bahas Smart City

BPIW Muda kembali menggelar webinar. Kali ini, webinar mengusung tema "*Implementing Smart City In The New Capital City*" yang menghadirkan narasumber *Chief Officer of Korean Cooperation Team for Indonesia Capital Relocation*, Hyungwook Choi dan Subkoor Wilayah II, BPIW Kementerian PUPR, Aji Noor Muhammad di Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.

Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto saat membuka acara mengatakan, generasi muda BPIW memang diharapkan dapat menggelar kegiatan yang dapat memberikan pandangan positif untuk para generasi muda. "Terkait tema kegiatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan harapan para generasi muda sendiri. Adapun kali ini mengangkat tema yang menarik terkait penerapan kota pintar di ibu kota negara," terangnya. (**)





[Bidik Lensa]

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air.

Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman. **Pada edisi ini rubrik bidik lensa Buletin Sinergi memotret program hunian atau penyediaan perumahan untuk di wilayah Sumatera.**



Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Latihan Kerja di Lampung

Rusun dibangun Kementerian PUPR untuk memfasilitasi ASN yang mengabdikan di Lampung.

Rumah Susun (Rusun) kampus Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang

Fasilitas tersebut dibangun untuk memfasilitasi hunian civitas akademika di kampus Unsri, Palembang.



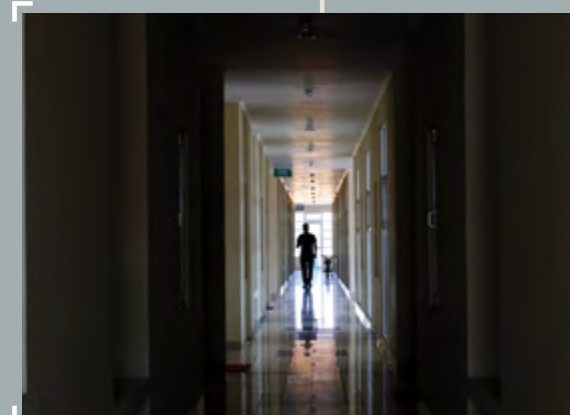
Rumah Susun (Rusun) kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung

Fasilitas tersebut dibangun untuk memfasilitasi civitas akademika di kampus ITERA, Lampung.



Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Pembangunan Rusun tersebut untuk memfasilitasi ASN Imigrasi di Kota Batam.



Mengenal Sejarah

Kota Tertua di Indonesia



Apakah kalian tau kota tertua di Indonesia? Yap *the one and only* kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Palembang memiliki berbagai tempat wisata sejarah yang menarik untuk dapat dikunjungi. Dalam hal ini pula, Kementerian PUPR juga berperan penuh untuk membangun infrastruktur di kota Palembang, terlebih baru-baru ini telah diresmikannya Tol Kayu Agung-Palembang. Nah berikut beberapa panduan jika anda akan berwisata sejarah di Kota Palembang.



TRANSPORTASI

- **Bus AKAP** — Rp 260k-400k
- **Kapal** — Kapal dari Jakarta (Merak)-Lampung (Bakaheuni) Rp15k, lalu kereta api sriwijaya II rute Lampung-Palembang kelas ekonomi Rp32k
- **Mobil/Motor** — ke pelabuhan Jakarta (Merak)-Lampung (Bakaheuni) Mobil Rp 419k dan Motor Rp 55k
- **Pesawat** — Jakarta - Palembang (1 Jam 5 Menit)

AKOMODASI

- Airish Hotel Palembang ★★★★★
- Batiqa Hotel Palembang ★★★★★
- Wyndham Opi Hotel ★★★★★

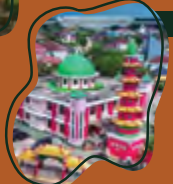
AKTIVITAS WISATA



Benteng Kuto Besak
Merupakan bangunan bersejarah yang didirikan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pembangunan bangunan ini berjalan selama 17 tahun pada abad ke 17 Masehi



Kawasan Makam Ki Gede Ing Suro
Kawasan Makam Ki Gede Ing Suro ini berlokasi di Jalan Ratu Sianum Lorong H Umar



Masjid Cheng Hoo Palembang
Masjid ini dibangun untuk menjalin hubungan baik antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat Palembang



Rumah Limas
Rumah ini merupakan rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan



Candi Bumi Ayu
Candi ini merupakan candi peninggalan agama hindu. Disini terdapat 9 buah candi. Sejak ditemukanya candi ini, upaya pelestarian masih terjaga hingga kini.



KULINER

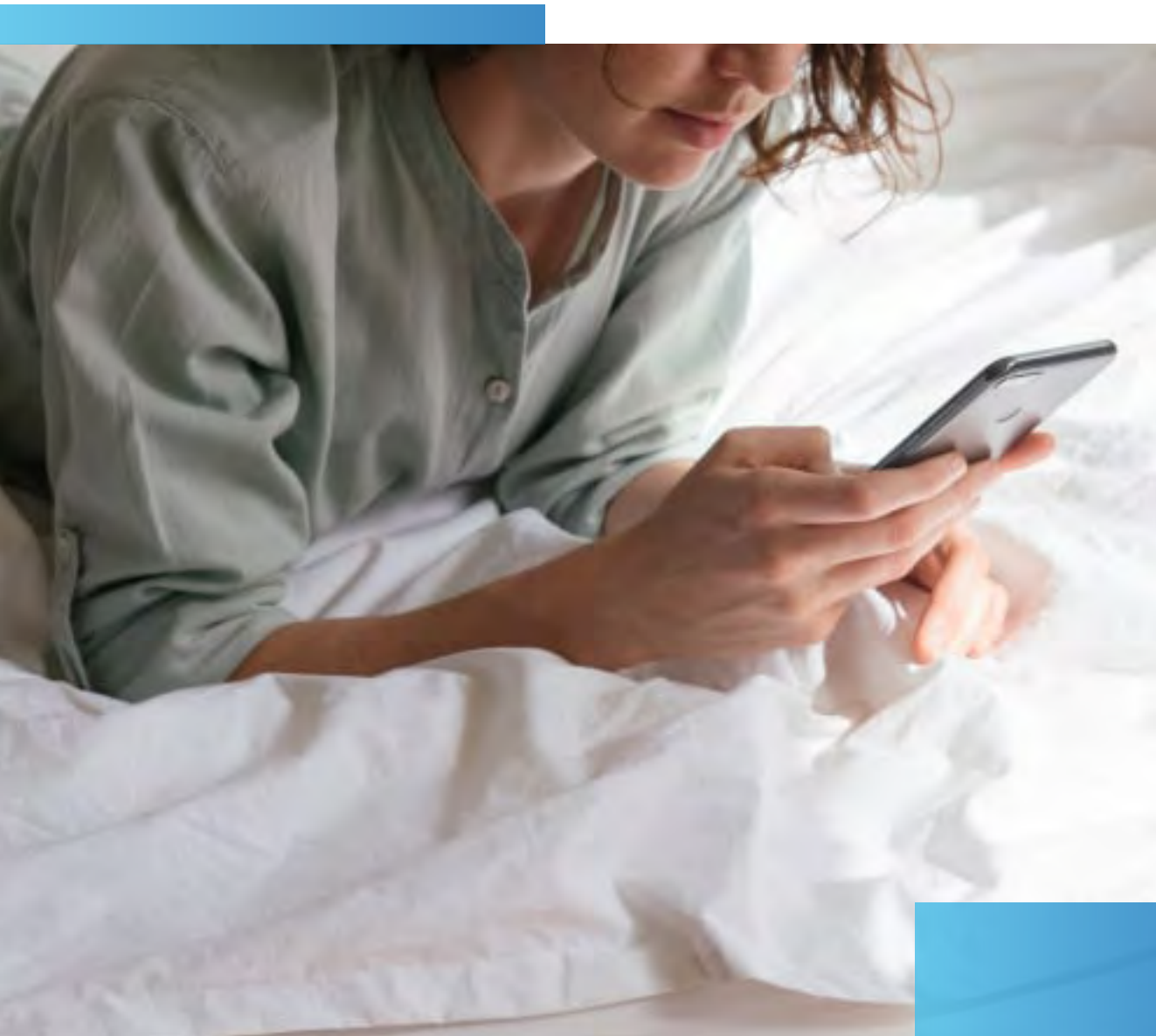
- Pempek Palembang
- Martabak Har
- Mie Celor
- Es kacang merah
- Rumah Makan Pindah Musi Rawas
- Tekwan



Tips berkunjung saat pandemi

1. Jaga Selalu Protokol Kesehatan (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan)
2. Membawa Hand Sanitizer
3. Memakai Sarung Tangan
4. Membawa Penyemprot Disinfektan

BAHAYA MAGER BAGI GENERASI MILLENNIAL



Saat ini kemajuan teknologi digital semakin masif, terutama penggunaan sejumlah media sosial yang dengan cepat diadaptasi oleh para millennial. Penggunaan media sosial yang cenderung berlebihan membuat Bahasa Indonesia termodifikasi menjadi absurd. Begitu banyak singkatan-singkatan kekinian yang muncul seperti kata mager atau malas gerak.

Oleh:

Mutia Susana
BPIW Muda/PNS 2018

Tentunya kata ini merupakan sebuah istilah familiar yang sering diungkapkan millennial saat ini. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu orang malas bergerak, diantaranya:

Berkembangnya teknologi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2010-2035, sekitar 34% jumlah penduduk Indonesia merupakan generasi millennial. Dengan jumlah yang mendominasi, serta dalam usia produktif membuat kebutuhan generasi millennial menjadi sesuatu yang layak diperhatikan, salah satunya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuat peralatan yang ada menjadi serba canggih dan semakin instan, serta memudahkan setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan dan efisien tanpa harus mengeluarkan energi dan dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berpindah tempat.

Kurangnya motivasi

Kurang motivasi diri dalam melakukan aktivitas fisik merupakan salah satu alasan mengapa seseorang malas gerak. Tidak adanya keinginan untuk hidup lebih sehat serta rajin berolahraga.

Kesenangan, atau Media Sosial

Menghabiskan waktu dengan menonton tv serta *online* di media sosial yang terlalu lama juga menjadi salah satu faktor malas gerak.

Kebiasaan Mager, apa dampaknya?

Beberapa pemicu *mager* seperti yang dipaparkan diatas, dapat berubah menjadi gaya hidup yang kurang baik jika dibiarkan terus-menerus. Secara tidak sadar, kita sebagai generasi *millennial* terlalu banyak menghabiskan waktu berjamjam *binge watching* drama korea dan netflix, duduk seharian bekerja, terlalu aktif dan menghabiskan waktu bermain media sosial seperti instagram, tiktok, dan lainnya, serta aktivitas *gaming*, tanpa melakukan olahraga ringan atau peregangan dengan alasan *mager*.

Mager atau dalam bahasa medisnya disebut *sedentary lifestyle* atau kondisi dimana seseorang melakukan *physical inactivity* ternyata menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. *World Health Organization* sebagai badan kesehatan dunia menyebutkan bahwa perilaku sedenter ini menimbulkan berbagai penyakit seperti kardiovaskular, kanker, stroke dan diabetes dengan persentase resiko sebesar 20-30%. *Mager* atau kurangnya aktivitas dapat menyebabkan penumpukan lemak di arteri serta penyumbatan pembuluh darah yang akan berujung serangan jantung. Tidak hanya itu, stroke juga dapat terjadi jika ada penyumbatan pembuluh darah ke otak. Sama seperti merokok yang meningkatkan risiko potensi masalah jantung, gaya hidup yang tidak banyak bergerak (*sedentary*) juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sama.



Selain itu, menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk dan tiduran menyebabkan meningkatnya kadar gula darah sehingga peluang terserang diabetes juga meningkat. Ditambah lagi sejumlah kebiasaan duduk dan tiduran sambil mencari camilan yang mengandung gula atau minuman manis.

Harvard Medical School juga melakukan penelitian terhadap 15.000 orang yang kurang aktivitas dan *mager*, juga memiliki resiko 70% lebih besar untuk mengalami trombosis vena (pembekuan darah di pembuluh vena) dibandingkan dengan mereka yang sering aktif bergerak. Tentunya kita menghindari hal seperti ini, kan?

Apa yang harus dilakukan?

Sama seperti COVID-19 yang terjadi saat ini, maka *mager* merupakan suatu masalah yang juga harus dicari "Anti-dot" nya. Salah satu cara mengurangi resiko kesehatan dari *sedentary lifestyle* ini adalah mulailah banyak bergerak. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik, termasuk

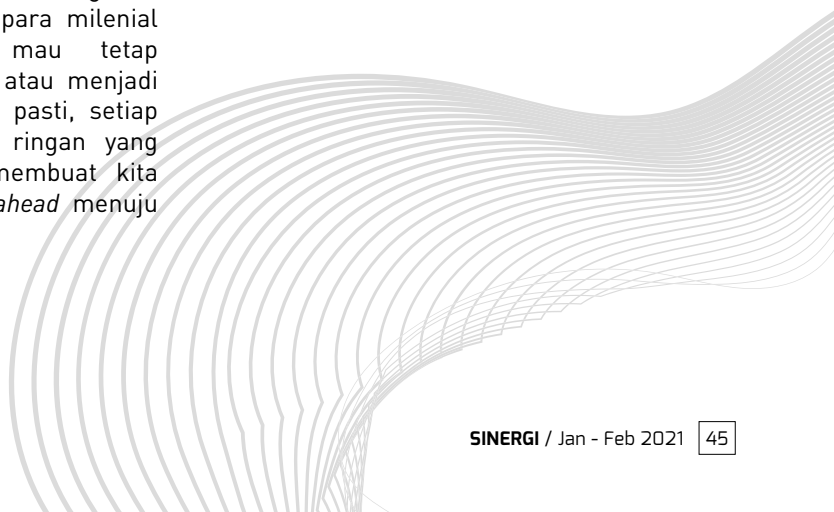
olahraga ringan dapat mengurangi risiko penyakit, apalagi jika diselingi dengan berbagai latihan kardiovaskular seperti lari atau bersepeda. WHO merekomendasikan untuk melakukan 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu. Maka dari itu, mulailah ikuti berbagai komunitas bersepeda atau lari, dari pada sekadar duduk berlama-lama sambil ngopi. Kita juga dapat mengatur waktu untuk berdiri, atau peregangan setiap 30 menit atau satu jam saat bekerja di meja, atau berjalan-jalan ringan saat istirahat makan siang.

Selain itu, pilih pilih makanan dan minuman yang sehat. Kemajuan teknologi membuat semuanya menjadi mudah, terutama untuk generasi millennial yang sering memesan makanan secara *online*. Jika diperhatikan secara seksama, orang-orang sudah mulai mengadaptasi kebiasaan hidup yang baik dengan membuat varian menu sehat, dan ini juga sudah mulai tersedia di menu aplikasi makanan *online*.

Istirahat yang cukup juga dapat membantu merevitalisasi tubuh agar dapat memulai pagi hari dengan kondisi fisik dan mental yang baik. Setelah beraktivitas seharian, pastikan beristirahat sekurang-kurangnya 6 jam di malam hari, untuk memulihkan kondisi tubuh.

Untuk mendukung kebiasaan hidup sehat ini, Kementerian PUPR telah mengakomodasi dengan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk berjalan-jalan santai, serta dapat juga bergabung dengan komunitas olahraga rutin olahraga gateball, futsal, dan kegiatan olahraga lainnya. Jadi, untuk para milenial tentukan pilihan apakah mau tetap melanjutkan kebiasaan *mager* atau menjadi lebih produktif. Satu hal yang pasti, setiap kegiatan kecil atau olahraga ringan yang dilakukan sehari-hari akan membuat kita semakin aktif serta *one step ahead* menuju hidup sehat. (**)

Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik, termasuk olahraga ringan dapat mengurangi risiko penyakit, apalagi jika diselingi dengan berbagai latihan kardiovaskular seperti lari atau bersepeda



KESEIMBANGAN ANTARA PEKERJAAN DAN KELUARGA

Benny Hermawan S.T, M.Sc

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR

Benny Hermawan S.T, M.Sc pada 22 Desember 2020 lalu resmi dilantik menjadi Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR. Berikut pada edisi ini Sinergi BPIW mencoba mengulas untuk mengenal sisi lain ayah dari dua putri dan satu cucu laki-laki ini.

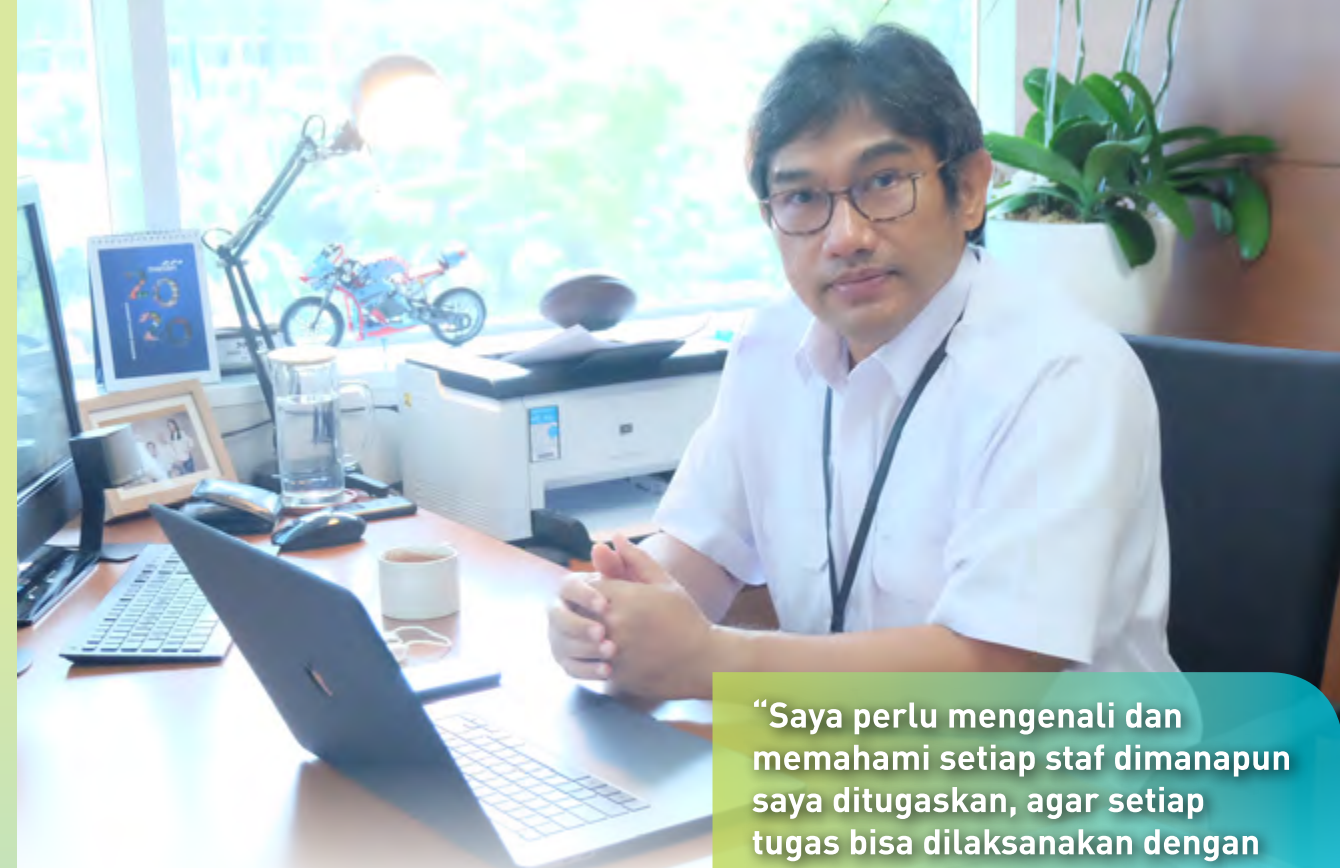
Baginya, terus belajar menjalani hidup dengan penuh rasa syukur merupakan ikhtiar yang tiada henti, baik dalam kondisi suka ataupun tidak suka. Juga dengan pekerjaan, percaya jika semua dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan sungguh-sungguh maka hasil itu akan sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan. "saya juga banyak belajar dari senior saya." ujar Benny.

Menurutnya, keberadaan keluarga itu memiliki peranan sangat penting. Bahkan keluarga menjadi energi tambahan dalam melaksanakan tugas-tugas di kantor. "Keluarga itu tempat kita bermula, memperkuat motivasi dalam bekerja dan setelah kita purna tugas, kita kembali ke keluarga" terang pria yang dikenal dekat dengan wartawan saat dikunjungi Sinergi di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Dengan begitu, ujar Benny, perhatian dan cinta terhadap keluarga itu mendukung keseimbangan dalam perjalanan hidup, agar hidup berjalan dengan baik. "Iya semua semangat dan pengorbanan yang dilakukan dalam pekerjaan, ujungnya untuk keluarga. Keluarga juga memberikan energi baik pada kita agar dalam bekerja selalu optimal. Saling

berkaitan," aku pria jebolan Institut Teknologi Bandung ini.

Lebih lanjut, Benny mengakui, dirinya kerap berupaya menerapkan pola kekeluargaan dengan jajaran staf untuk membentuk team work yang saling melengkapi dan syukur-syukur bisa militan. "Iya artinya saya perlu mengenali dan memahami setiap staf dimanapun saya ditugaskan, agar setiap tugas bisa dilaksanakan dengan sasarannya bagaimana agar output yang kita hasilkan maksimal.," ungkap pria yang sudah mengabdikan di Kementerian PUPR hampir 25 tahun.

Pria kelahiran Kota Malang ini juga berpendapat, menjalani hobi dalam hidup itu perlu, agar lebih berwarna dan tidak monoton. Hobi itu tidak selalu harus mahal dan menguras isi kantong. "Saya termasuk orang yang banyak hobi. Salah satu hobi dari muda itu bersih-bersih rumah," ujar Benny diiringi tawa. Ia menceritakan, hobinya itu sempat membuat Ibu kandungnya merasa terharu. Saat itu, Benny muda ketika liburan kuliah pernah membersihkan peralatan dapur, seperti alat masak sampai tempat bumbu-bumbu. "Lumrahnya suasana dapur itu ada berminyak, kusam dan lainnya. Namun dapur yang sudah saya bersih-bersih itu benar-bener bersih dan rapi. Saat Ibu saya pulang itu terkejut karena tempat bumbu bersih dan rapi. Dan wadah bumbu itu kini disimpan oleh mami saya sebagai kenang-kenangan.," kenang Benny.



"Saya perlu mengenali dan memahami setiap staf dimanapun saya ditugaskan, agar setiap tugas bisa dilaksanakan dengan sasarannya bagaimana agar output yg kita hasilkan maksimal."

Benny mengaku, dirinya sejak kecil memang diberi tanggungjawab untuk membersihkan rumah sebelum berangkat sekolah. "Jadi saya dan kakak itu, harus ngepel atau menyapu setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya kerja sama dengan kakak," jelas sosok yang dikenal ramah ini. Selain itu, hobi lainnya yang biasa dijalani yakni, mendengarkan lagu, bersepeda, jalan-jalan pagi di GBK, sekitar rumah, dll. "Kalau jalan-jalan pagi sama istri, saya biasa menyempatkan diri beli panganan, ngopi, dan lainnya yang bikin seru. Olahraga menjaga kita bisa menikmati aneka makanan," terang ayah dari Putty Junia dan Tsania Meidini ini.

Selain itu, Benny juga sejak lama hobi nonton film. Bahkan, ia mengalokasikan waktu lebih lama untuk nonton film dibandingkan gowes. "Dari nonton film itu, ada hal bagaimana kita melatih konsentrasi, fokus, sabar ikuti alur, ada sedih dan menikmati gembira serta hope. Kadang kita dapat banyak inspirasi dan informasi kekinian sampai masa depan dari film," papar lelaki berkaca minus ini.

Terkait pengalaman kerja, Benny menilai, semua pengalaman kerja itu menarik dan penting. "Dari mulai menjadi staf sampai sekarang ini, pengalaman kerja itu selalu

memberikan pembelajaran. Benar kata pepatah Pengalaman itu Guru yang Terbaik," papar Benny. "Seperti cara menghadapi beragam karakter orang. Dalam pengalaman itu memang ada enak dan tidak enak, tapi itu semua mengandung pembelajaran," jelasnya. Hanya saja, Benny mengakui, salah satu pengalaman berkesan selama mengabdikan di Kementerian PUPR adalah tugas sekolah. Saat itu, ia berkesempatan sekolah S2 ke Negeri Kincir Angin. Benny berjalan tugas studi ke Belanda bersamaan dengan istri yang juga mendapatkan kesempatan sekolah disana, dan anak sulung ikut serta.

Selain itu, ia mengakui, senangnya sekolah di Belanda itu karena dapat merasakan bagaimana pelajaran kampus mengenai perencanaan perkotaan dapat diwujudkan secara nyata. "Di Belanda, tata kotanya baik dan seakan kita merasakan sebuah kota ideal, seperti bersepeda kemana saja, transportasi publik yang baik, ruang terbuka hijau yang memadai, lingkungan bersih yang cukup dan lainnya," terangnya. Ia juga mengakui, karena tugas sekolah uang di

“Pengalaman kerja selalu memberikan pembelajaran. Benar kata pepatah, pengalaman itu Guru yang terbaik.”

kantong dapat dibilang pas-pasan. Hanya saja, ada cara bagi keluarga untuk bisa mengkonsumsi makanan sehat setiap hari, seperti buah-buahan serta daging ayam. “Jenis daging ayamnya khusus bagian sayap dari toko Turki karena jarang disukai warga di sana, sehingga murah. Alhamdulillah, saya beruntung ada yang masak, sehingga lebih hemat,” ungkap Benny mengenang.

Adapun dengan amanahnya yang masih relatif baru, Benny mengakui perlu belajar lebih cepat dan segera konsolidasi internal, serta kulonuwun ke para kerabat perencanaan agar dapat menindaklanjuti arahan Bapak Kepala BPIW. Pada waktu dekat, kita akan bergotong royong menuntaskan LAKIP 2020 yang sekarang menjadi salah satu tugas BPIW, bersama Biro PKLN dan unor ABCP SIBB, serta menyiapkan pelaksanaan Rakorbangwil. Selain itu Bapak Kaba juga mengarahkan penyelesaian peta Manajemen resiko dan internalisasinya serta menuntaskan beberapa SOP dan panduan-panduan keterpaduan, serta penyiapan skenario Renstra yang adaptif dengan situasi pandemi Covid 19 ini,. “Seperti dalam dokumen Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 diperkirakan ada gap pembiayaan, nah seperti apa yang perlu dilakukan solusinya,” terang pria berkaca mata minus ini.

Benny juga menyebutkan hal penting lainnya dan tidak boleh dilupakan, mengelola *Knowledge management* di Pusnas, karena sudah banyak yang dihasilkan oleh tim pusnas agar bisa siap digunakan kapan saja dibutuhkan, menjaga semangat warga

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah nasional atau Pusnas yang sudah bagus dan meningkatkan kebahagiaan bekerja keluarga Pusnas agar daya tahan tubuh terjaga serta mendorong selalu ada produk konkrit yang bisa dihasilkan. Jadi selain menyiapkan laporan pekerjaan tahun sebelumnya melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Tim Pusnas juga akan melaksanakan tugas-tugas tahun berjalan dan menyiapkan yang akan datang. “Termasuk kita juga akan mempersiapkan input, untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2020-2045 serta Renstra Kementerian PUPR yang akan berjalan,” terang Benny yang mengalami enam kepemimpinan Menteri di PU, Kimbangwil, Kimpraswil dan PUPR, yakni Bapak Radinal Mochtar, Bapak Rachmadi Bambang, Ibu Erna Witoelar, Bapak Soenarno, Bapak Djoko Kirmanto dan Menteri PUPR sekarang, Bapak Basuki Hadimuljono. (Daris)

BIODATA

Nama : Benny Hermawan S.T, M.Sc,
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW Kementerian PUPR
 Istri : Evi Hermirasari
 Anak : 1. Putty Junia
 2. Tsaniya Meidini

Studi Formal

S1 Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung
 S2 Master Of Science In Urban Infrastructure Engineering And Management, International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Belanda



PESAN PEMBACA

✉ **Humas BPIW**

✔
Ratih (Yogyakarta)
✉

Sebaiknya infrastruktur sudah dilakukan secara merata dan sudah tidak ada lagi disparitas antar wilayah. Pembangunan Infrastruktur di seluruh Indonesia harus terus digenjut, dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut maka konektivitas yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain akan tersambung dengan baik.

☐
Tanggapan

Dalam hal ini peran pemerintah dalam menghadapi disparitas (ketimpangan) antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang butuh perhatian bangsa. Terlihat pertumbuhan ekonomi di Kawasan barat Indonesia masih mendominasi. Untuk itu dalam hal ini pemerintah mengedepankan pembangunan Indonesia bagian timur, dirasa strategi ini dapat mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk dapat memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat pertumbuhan di luar Jawa, serta mempercepat pengembangan Kawasan perbatasan, kepulauan terluas, dan daerah tertinggal agar pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi angka kemiskinan dan dapat terdistribusi secara merata, terutama di bagian Indonesia Timur.

✔
Manaf (Jakarta)
✉

Pemerintah terlebih Kementerian PUPR saya rasa sudah cukup baik dalam membangun akses infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas. Saya berharap fasilitas bagi para penyandang disabilitas dapat diperluas di berbagai lokasi.

☐
Tanggapan

Dalam hal ini Kementerian PUPR ingin mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang lebih sejahtera.



KUIS

APAKAH KAMU TAHU?

TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH

PERTANYAAN

1. Salah satu program Kementerian PUPR dalam Pemulihan Ekonomi Nasional?
2. Apa Tema BPIW Expo 2020?
3. Sebutkan Kawasan Industri yang mulai dikembangkan tahun 2020 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional?

KETENTUAN:

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : humasbpiw@pu.go.id. Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 51, Maret-April.

**CEGAH
COVID-19**

**BARENG
PAK BAS**

PAKAI MASKER
DENGAN BENAR

BAWA ALAT
MAKAN PRIBADI

AYO
JAGA JARAK

ASUPAN GIZI
HARUS DIJAGA

KURANGI PERGI
KE TEMPAT RAMAI

SERING
CUCI TANGAN
DENGAN SABUN

Cara Hidup Sehat Hadapi New Normal



Bawa Bekal Sendiri

Salah satu cara terbaik dan termudah untuk menjalani hidup tetap sehat adalah dengan mengemas makan siang dan membawanya ke kantor dari pada terus menerus memesan. Anda bisa menentukan sendiri menu masakan sehat yang ingin dikonsumsi, bahkan anda bisa berkreasi membuat makanan yang nikmat dari pada hanya makan itu-itu saja di kantin.



Jangan Lupa Duduk Santai dan Beristirahat

Fokus pada pekerjaan yang memang penting, namun jangan terlalu berlebihan. Sebab dalam studi disebutkan bahwa duduk selama lebih dari 8 jam sehari dapat meningkatkan resiko terkena diabetes 2 tipe hingga 90%. Cobalah untuk rebahan atau berdiri sejenak untuk meregangkan tubuh agar tidak kaku.

Jalan-jalan Sore

Kegiatan ini masih berkaitan dengan point kedua, bedanya adalah dilakukan pada saat libur. Cobalah luangkan waktu 5-7 menit untuk jalan-jalan di sekitar rumah pada saat libur untuk tetap aktif bergerak dibanding terus tidur di rumah.



Rutin Olahraga

Cara terbaik untuk memastikan tubuh anda benar-benar sehat adalah dengan meluangkan waktu untuk berolahraga secara rutin pada pagi hari. Jadwalkan olahraga di sela-sela jadwal pekerjaan anda dan berkomitmenlah dengan hal itu.